

SIKAP PUBLIK TERHADAP PROGRAM REFORMASI PERTANAHAN DAN PERPAJAKAN

Temuan Survei Nasional Tatap Muka:
13 - 20 September 2022

The logo for INDIKATOR features the word "INDIKATOR" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is stylized as a circle with a teal center and a red arrow pointing towards the top right. Above the logo is a thick red horizontal bar, and below it is a red graphic element consisting of two overlapping triangles pointing towards each other.

Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Pusat
Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867
Website: www.indikator.co.id

PENGANTAR

- Berbagai upaya pembangunan negara mensyaratkan pendapatan negara yang kuat sebagai penopangnya. Salah satu sumber pendapatan negara yang menjadi tumpuan pembangunan adalah pajak. Oleh karena itu, upaya optimalisasi penerimaan pajak mutlak dilakukan.
- Sejak 1983 melalui reformasi UU Perpajakan hingga 2020 melalui Reformasi Perpajakan Jilid III, pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan sasaran meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi meliputi perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan (pajak.go.id). Buah dari Reformasi Perpajakan adalah terjadinya peningkatan realisasi target penerimaan pajak tiap tahunnya, hingga pada 2021 berhasil melampaui target (komjakwas.kemenkeu.go.id). Namun demikian, upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak masih terus dilakukan karena dibandingkan negara lain, rasio pajak Indonesia dinilai masih belum optimal.
- Selain pajak, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi beban anggaran negara melalui pengurangan subsidi BBM. Namun demikian, kebijakan ini banyak menimbulkan perdebatan karena kenaikan harga yang ditimbulkannya sehingga membebani ekonomi rumah tangga masyarakat.

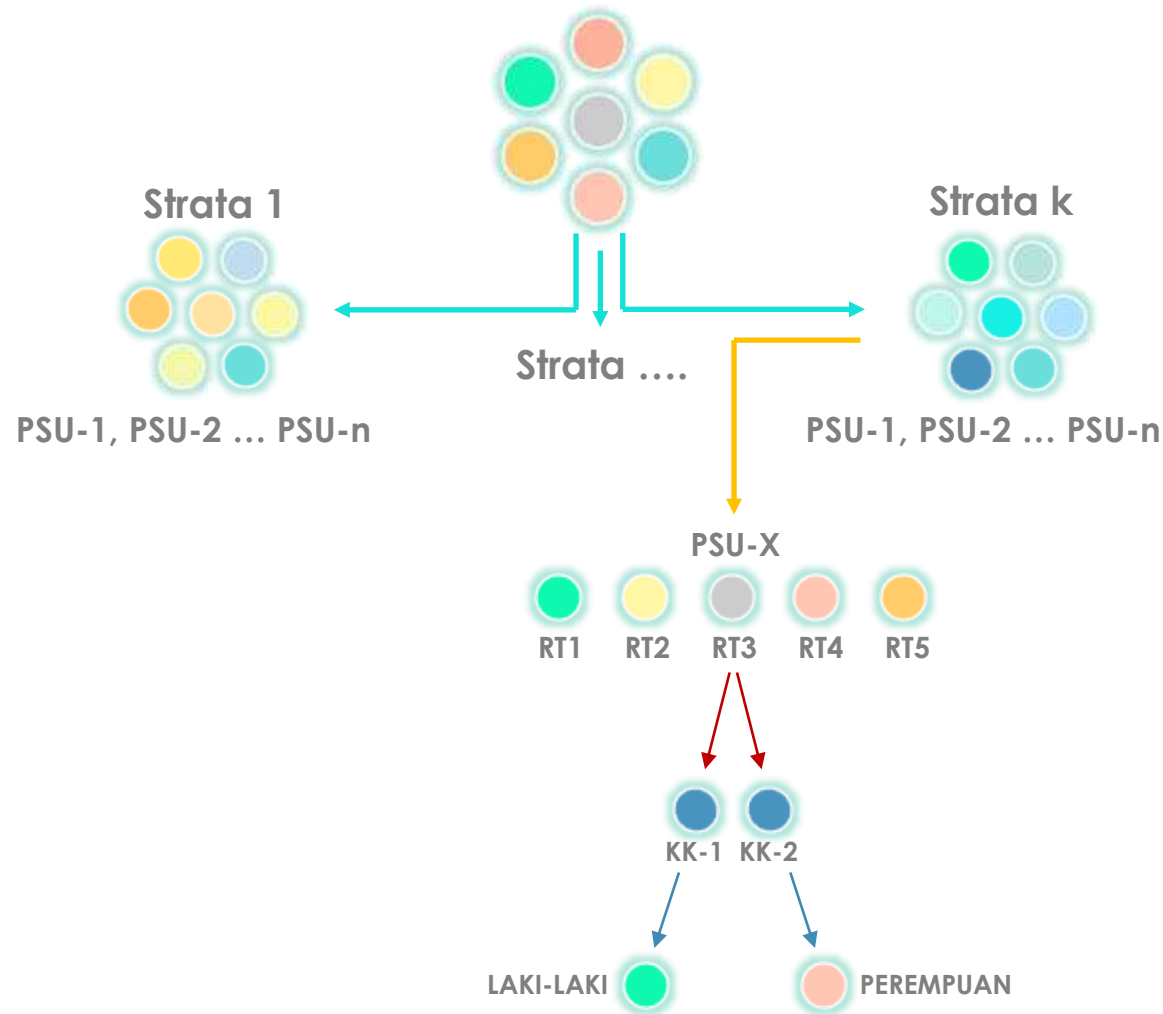
PENGANTAR

- Kebijakan lain dari pemerintah yang tengah berjalan terkait dengan pertanahan, merupakan bagian dari reformasi pertanahan. Masalah pertanahan dapat berdampak pada kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum penting untuk menjamin rasa aman dan menghindari sengketa tanah yang masih sering terjadi di tengah masyarakat. Sedangkan kesejahteraan tercapai ketika pemilih tanah yang sah dapat memanfaatkan tanah haknya untuk kegiatan usaha. Untuk tujuan tersebut, maka program pemerintah terkait pertanahan perlu diketahui dan mendapat dukungan dari masyarakat agar program-program tersebut dapat berjalan dengan sukses.
- Sejauh mana masyarakat saat ini mengetahui dan mendukung program-program reformasi pertanahan dan perpajakan yang dicanangkan pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei opini publik secara nasional. Survei menanyakan tentang pengetahuan dan sikap publik terhadap program reformasi perpajakan seperti kepemilikan NPWP, prinsip perpajakan, dan ketentuan lain tentang perpajakan bagi warga. Survei juga menanyakan tentang kenaikan harga BBM dan memetakan dukungan warga yang membayar pajak. Selain itu, survei menanyakan tentang pengetahuan dan dukungan pada program pertanahan, antara lain program Pendaftaran Tanah Sertifikasi Lengkap (PTSL), layanan dan pengaduan masalah pertanahan.
- Hasil survei dapat menjadi gambaran tentang pengetahuan dan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah tersebut, serta memetakan faktor yang berhubungan dengan dukungan masyarakat.

METODE

- Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
- Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%.
- Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
- Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

FLOWCHART PENARIKAN SAMPEL



Populasi desa/kelurahan (PSU).

Desa/kelurahan (PSU) di tiap strata dipilih secara random dengan jumlah proporsional.

Di setiap PSU terpilih, dipilih sebanyak 5 RT (satuan lingkungan terkecil di atas KK) dengan cara random.

Di masing-masing RT/Lingkungan terpilih, dipilih secara random dua KK.

Di tiap KK terpilih, dipilih secara random satu orang yang punya hak pilih, laki-laki/perempuan.

INDIKATOR

TEMUAN: VALIDASI SAMPEL

PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
GENDER		
Laki-laki	50.1	50.0
Perempuan	49.9	50.0
DESA-KOTA		
Pedesaan	49.7	50.2
Perkotaan	50.3	49.8
USIA		
<= 20 tahun	9.8	10.3
21-25 tahun	12.0	12.5
26-30 tahun	13.0	13.5
31-35 tahun	11.6	12.0
36-40 tahun	11.6	11.6
41-45 tahun	10.0	9.8
46-50 tahun	9.2	8.6
51-55 tahun	6.7	6.6
56-60 tahun	5.4	5.1
> 60 tahun	10.8	10.1

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PENDIDIKAN		
<= SD	36.2	37.0
SLTP	18.0	18.0
SLTA	31.8	31.2
Kuliah	14.0	13.7
AGAMA		
Islam	87.7	87.3
Protestan/Katolik	9.3	9.8
Lainnya	3.0	3.0
ETNIS		
Jawa	40.9	40.2
Sunda	15.7	15.5
Batak	3.7	3.6
Madura	3.1	3.0
Betawi	2.9	2.9
Minang	2.8	2.7
Bugis	2.6	2.7
Melayu	2.2	2.3
Lainnya	26.2	27.1

PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

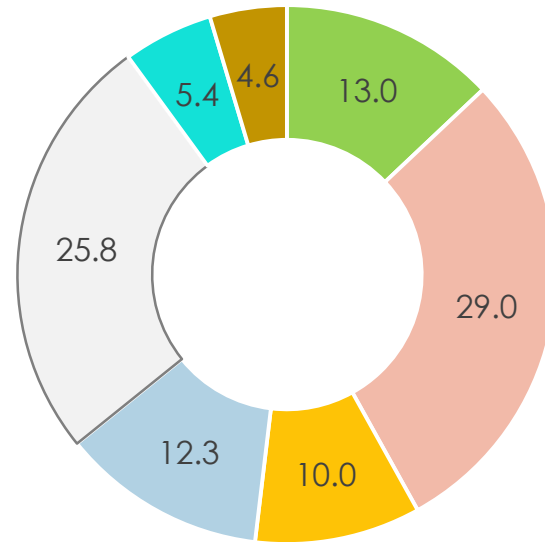
KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
ACEH	1.8	1.8
SUMATERA UTARA	5.1	5.1
SUMATERA BARAT	1.9	1.9
RIAU	2.0	2.0
JAMBI	1.3	1.3
SUMATERA SELATAN	3.1	3.1
BENGKULU	0.7	0.7
LAMPUNG	3.2	3.2
KEPULAUAN BANGKA	0.5	0.5
KEPULAUAN RIAU	0.6	0.6
DKI JAKARTA	4.1	4.1
JAWA BARAT	17.4	17.4
JAWA TENGAH	14.6	14.6
DI YOGYAKARTA	1.4	1.4
JAWA TIMUR	16.2	16.2
BANTEN	4.3	4.3
BALI	1.6	1.6

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
NUSA TENGGARA BARAT	1.9	1.9
NUSA TENGGARA TIMUR	1.8	1.8
KALIMANTAN BARAT	1.9	1.9
KALIMANTAN TENGAH	0.9	0.9
KALIMANTAN SELATAN	1.5	1.5
KALIMANTAN TIMUR	1.3	1.3
KALIMANTAN UTARA	0.2	0.2
SULAWESI UTARA	1.0	1.0
SULAWESI TENGAH	1.0	1.0
SULAWESI SELATAN	3.2	3.2
SULAWESI TENGGARA	0.9	0.9
GORONTALO	0.4	0.4
SULAWESI BARAT	0.5	0.5
MALUKU	0.7	0.7
MALUKU UTARA	0.4	0.4
PAPUA BARAT	1.9	1.9
PAPUA	0.4	0.4

PEKERJAAN DAN PENDAPATAN

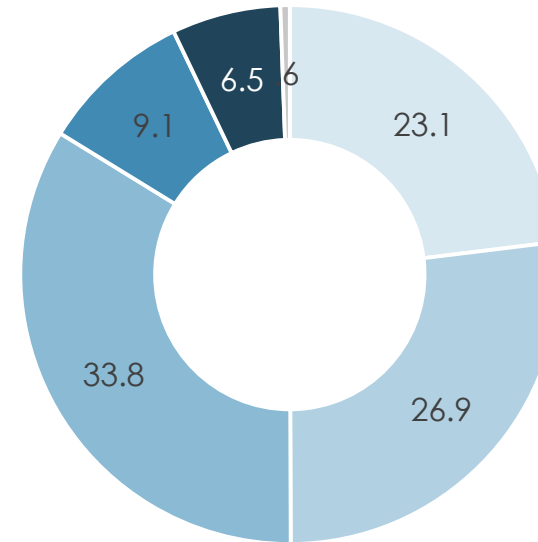
Pekerjaan (%)

- Petani/peternak/ nelayan
- Buruh kasar, sopir/ojek, security, PKL/warung, tidak tetap, menganggur
- Wiraswasta, pengusaha
- Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional
- Ibu Rumah Tangga
- Pelajar/kuliah
- Lainnya



Pendapatan (%)

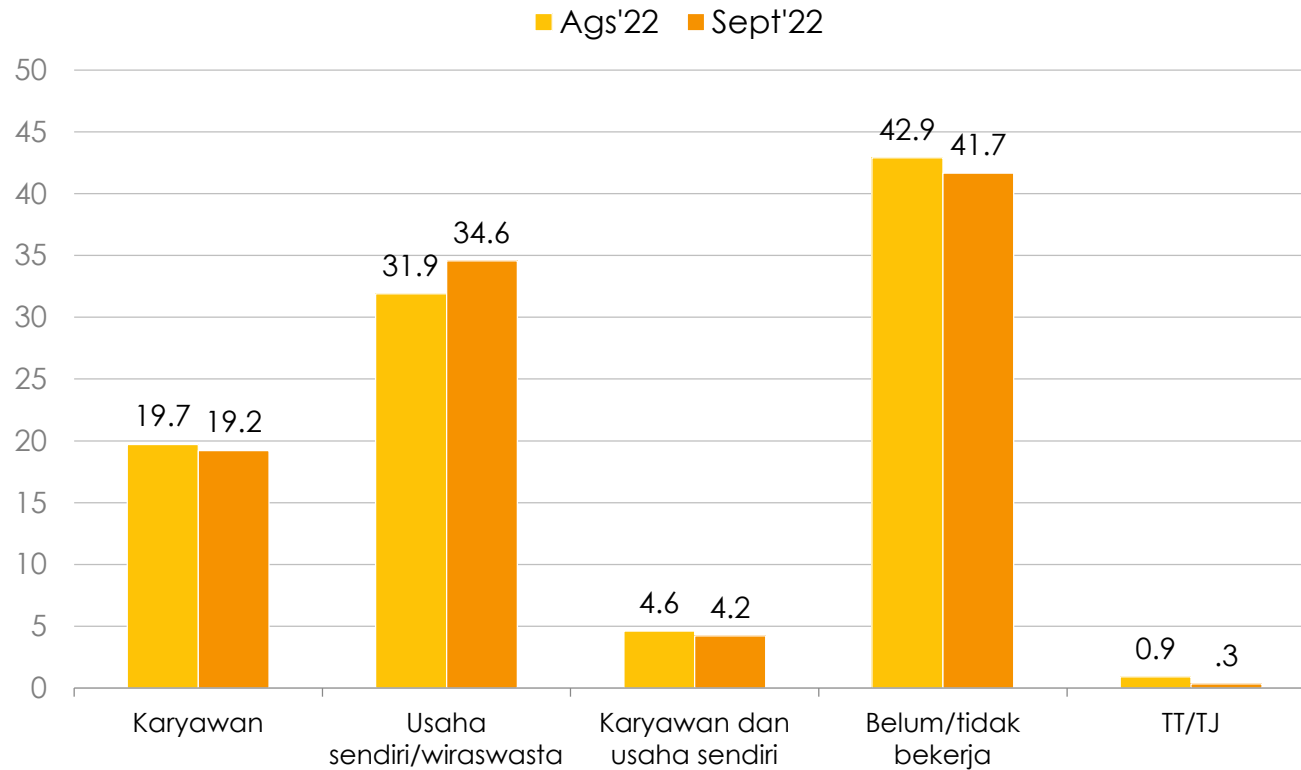
- < 1 juta
- 1 - < 2 juta
- 2 - < 4 juta
- 4 - < 6 juta
- >= 6 juta
- Tidak jawab



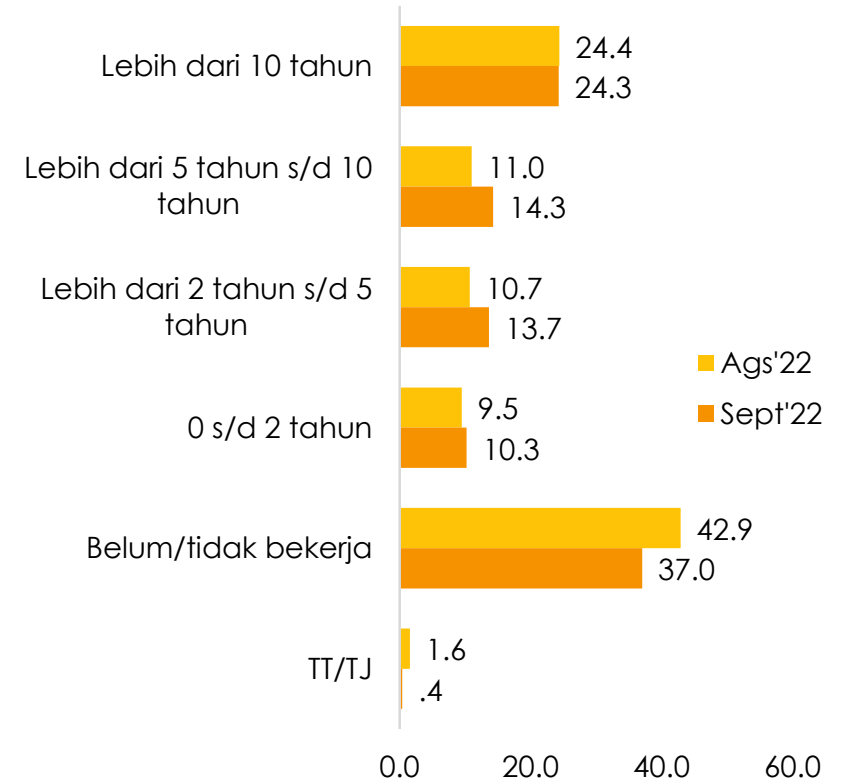
PERPAJAKAN

STATUS PEKERJAAN

Tolong Ibu/Bapak sebutkan status pekerjaan Ibu/Bapak?... (%)

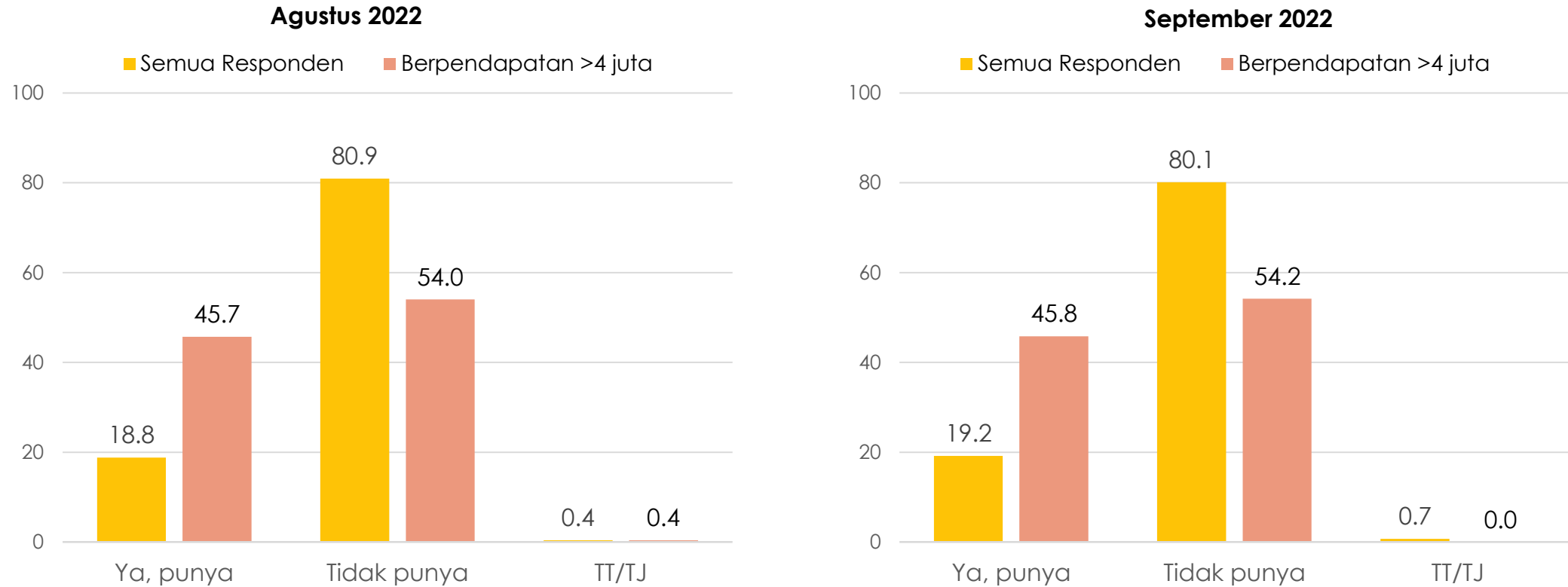


Sudah berapa lama Ibu/Bapak menjalani pekerjaan tersebut?... (%)



KEPEMILIKAN NPWP

Apakah Ibu/Bapak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?... (%)



Sekitar 18-19% warga mengaku punya NPWP, terutama kelompok warga dengan pendapatan 4 juta ke atas.



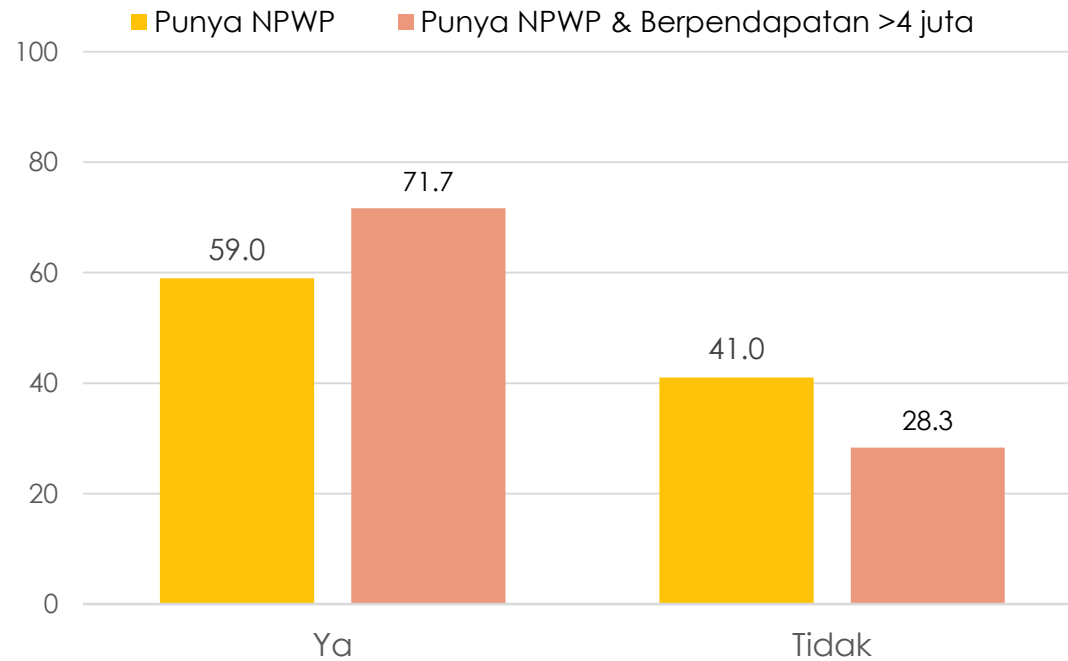
MENYAMPAIKAN SPT DAN MEMBAYAR PAJAK

Apakah Ibu/Bapak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan SPT Tahunan PPh)?... (%)

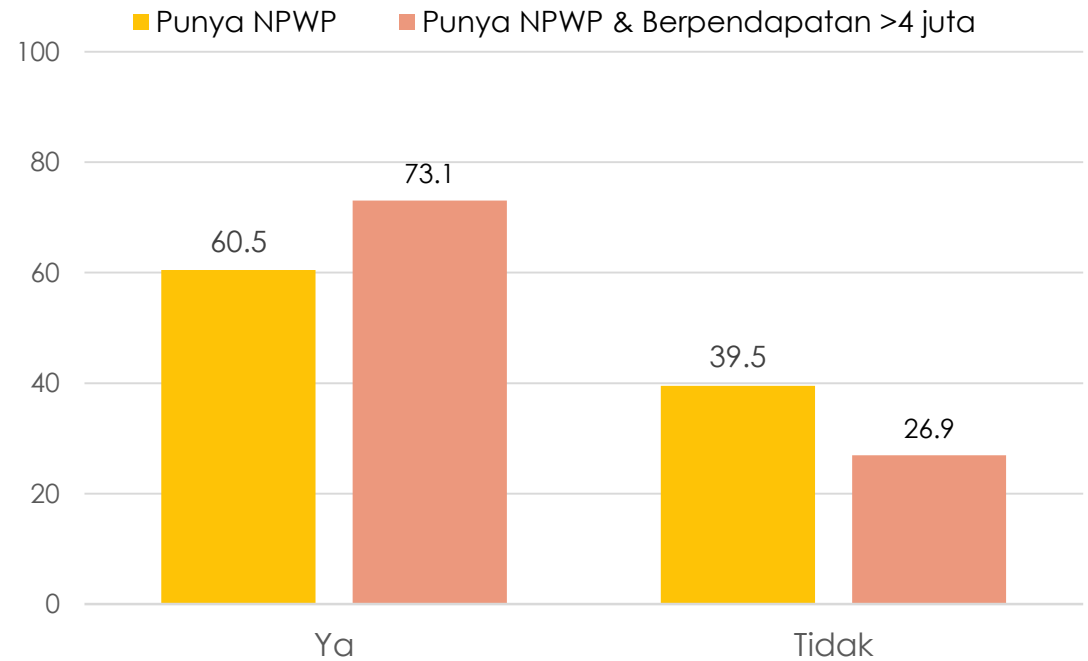
Apakah Ibu/Bapak membayar Pajak Penghasilan (PPh) (baik orang pribadi ataupun badan), baik secara langsung atau melalui perusahaan tempat Ibu/Bapak bekerja?... (%)

(Base: Memiliki NPWP)

Menyampaikan SPT



Membayar Pajak Penghasilan



Di antara yang memiliki NPWP mayoritas menyampaikan SPT dan membayar pajak PPh. Masih sangat besar kelompok warga yang memiliki NPWP yang belum membayar pajak.

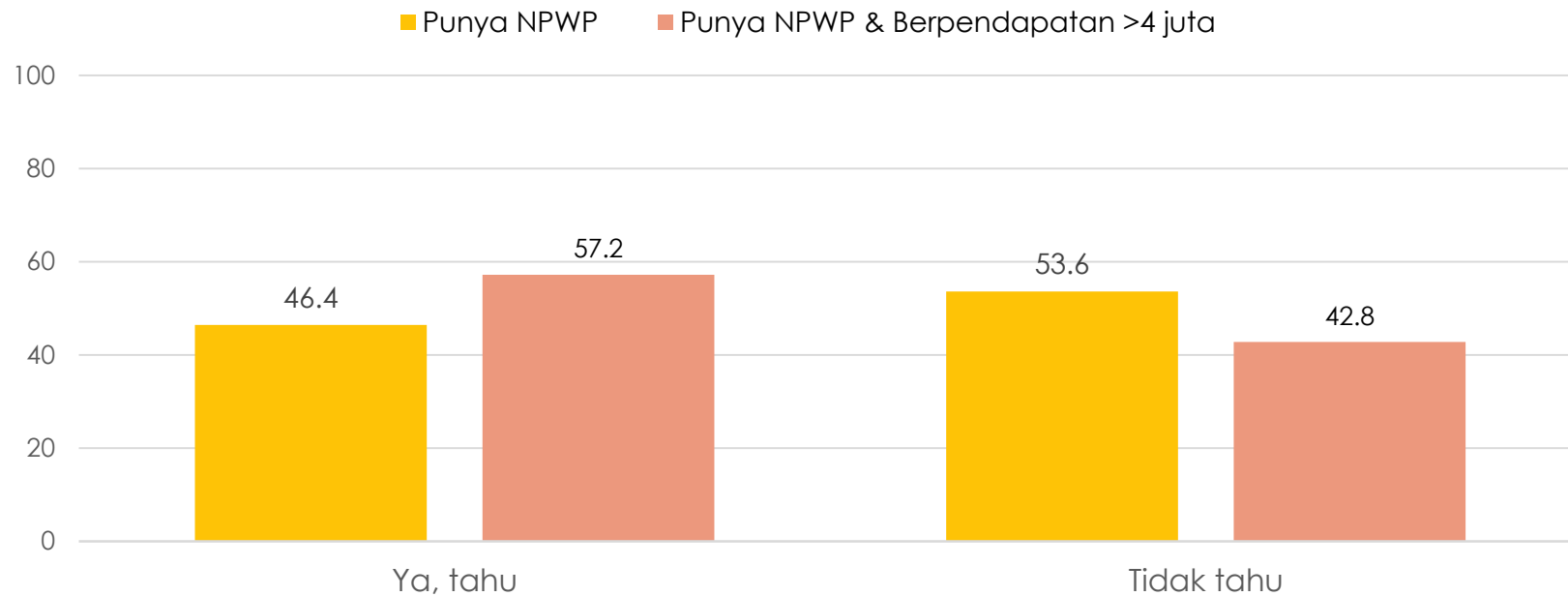
KEPEMILIKAN NPWP, MENYAMPAIKAN SPT DAN MEMBAYAR PAJAK MENURUT STATUS PEKERJAAN

	Base	Memiliki NPWP	Menyampaikan SPT	Membayar Pajak
Karyawan	19.2	36.7	70.9	73.1
Usaha sendiri/wiraswasta	34.6	18.7	57.2	57.3
Karyawan dan usaha sendiri	4.2	20.2	61.2	61.7
Belum/tidak bekerja	41.7	11.5	43.4	46.0

Kelompok karyawan lebih banyak memiliki NPWP 36.7%, dan paling tinggi tingkat kepatuhannya membayar pajak 73.1%.

AWARENESS BAHWA ORANG YANG BERPENGHASILAN HINGGA RP 4.5 JUTA TIDAK KENA PAJAK

Sebagai wajib pajak Orang Pribadi, apakah Ibu/Bapak mengetahui atau pernah dengar bahwa pemerintah menetapkan orang yang berpenghasilan hingga Rp. 4.5 juta/bulan tidak kena kena pajak?... (%)
(Base: Memiliki NPWP)



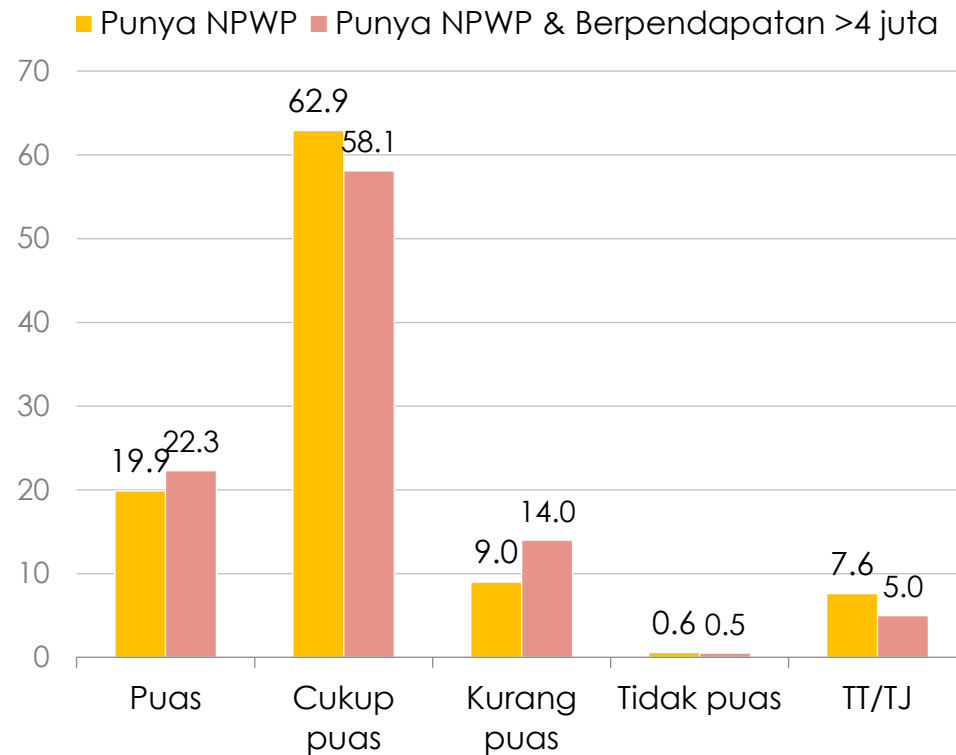
Sekitar 46.4% mengetahui atau pernah dengar bahwa pemerintah menetapkan orang yang berpenghasilan hingga Rp. 4.5 juta/bulan tidak kena kena pajak.

EVALUASI TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PAJAK

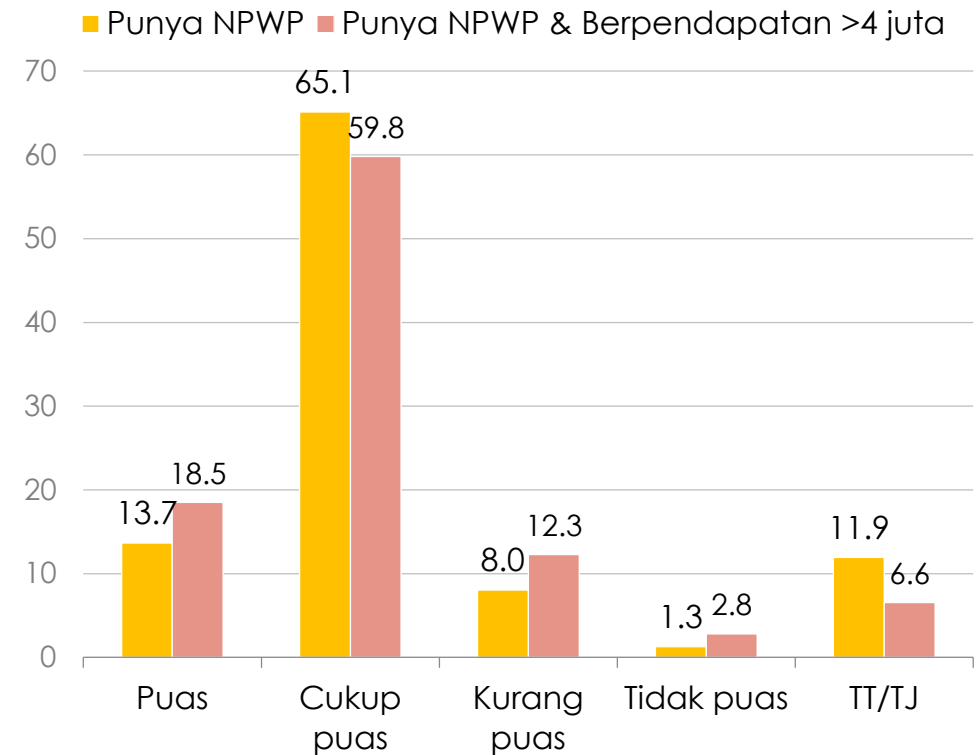
Seberapa puas Ibu/Bapak dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak ketika Ibu/Bapak berhubungan/berurusan dengan kantor pajak, apakah puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas?... (%)

(Base: Memiliki NPWP)

Agustus 2022



September 2022



Mayoritas merasa cukup/sangat puas dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak.

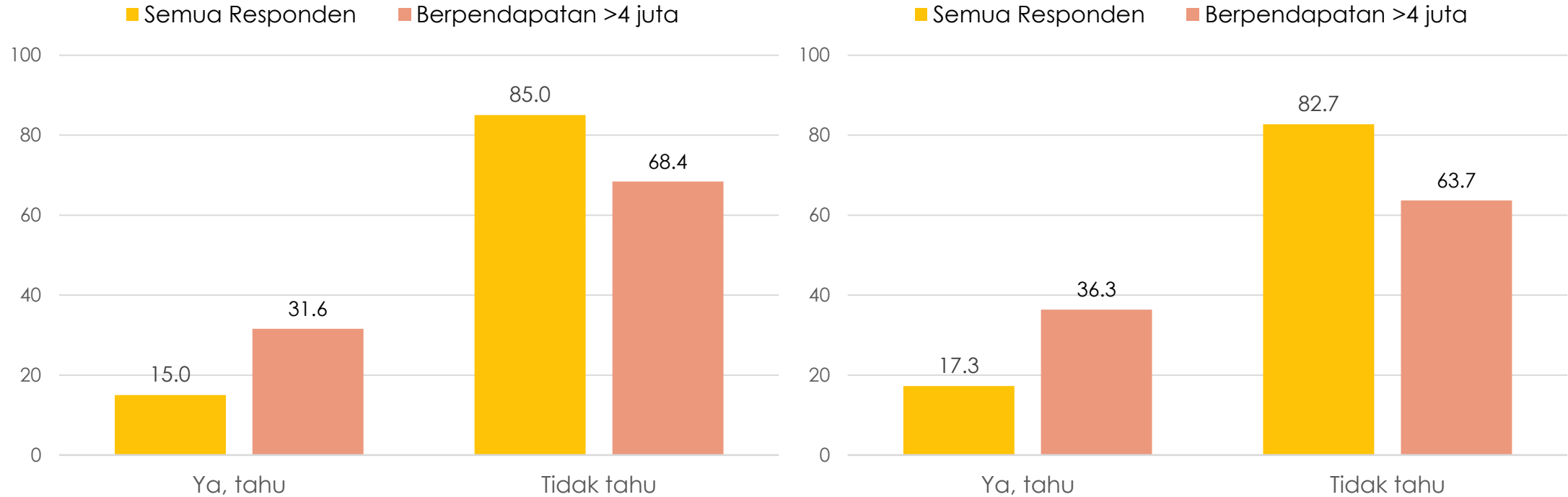
INDIKATOR

NIK MENJADI PENGGANTI NPWP

Apakah Ibu/Bapak mengetahui bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?... (%)

Agustus 2022

September 2022

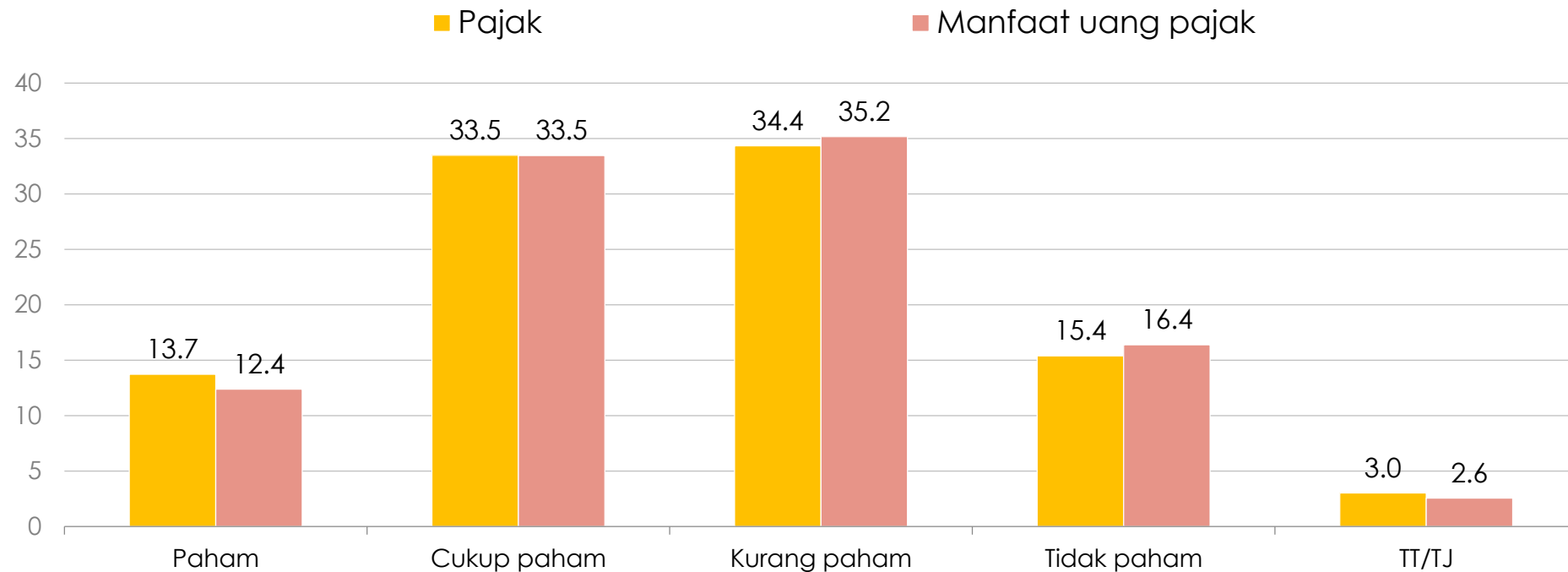


Pengetahuan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengalami sedikit peningkatan.



PEMAHAMAN PUBLIK TERHADAP PAJAK DAN MANFAAT UANG PAJAK

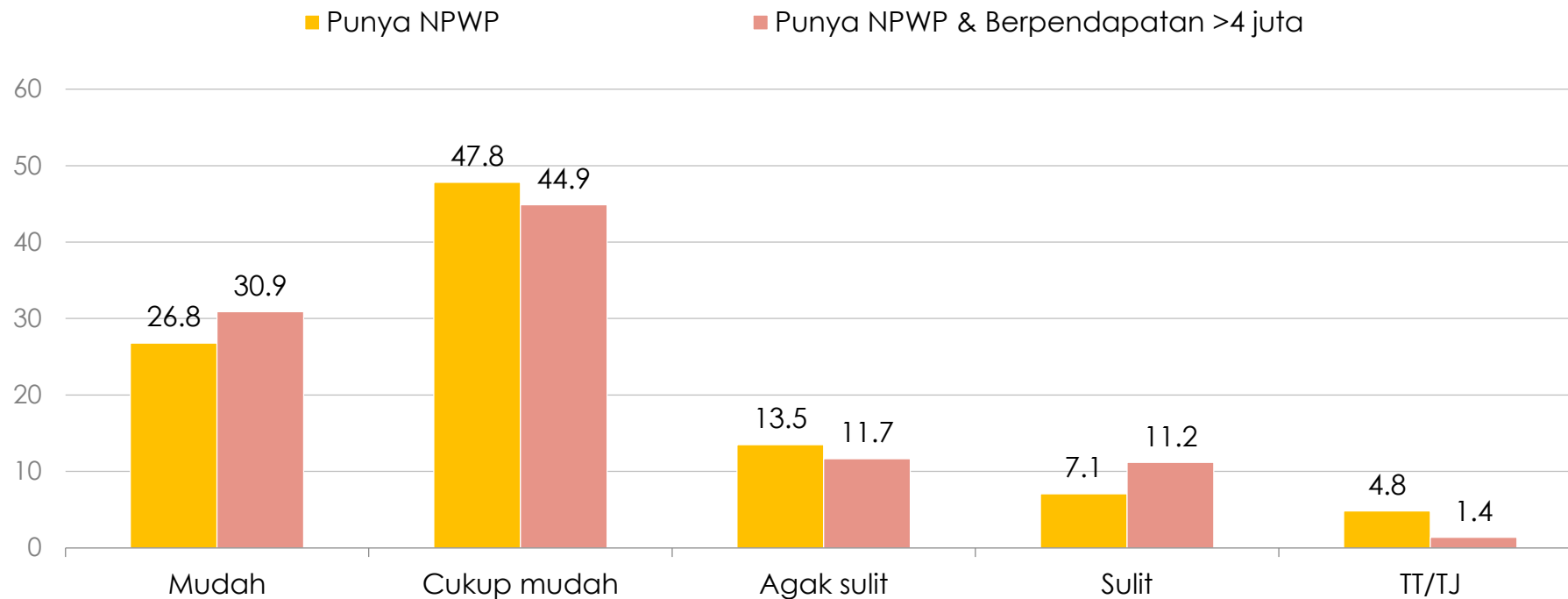
Apakah Ibu/Bapak paham, cukup paham, kurang paham atau tidak paham tentang apa yang dimaksud ... (%)



Sangat banyak publik yang kurang/tidak paham dengan pajak dan manfaat uang pajak.

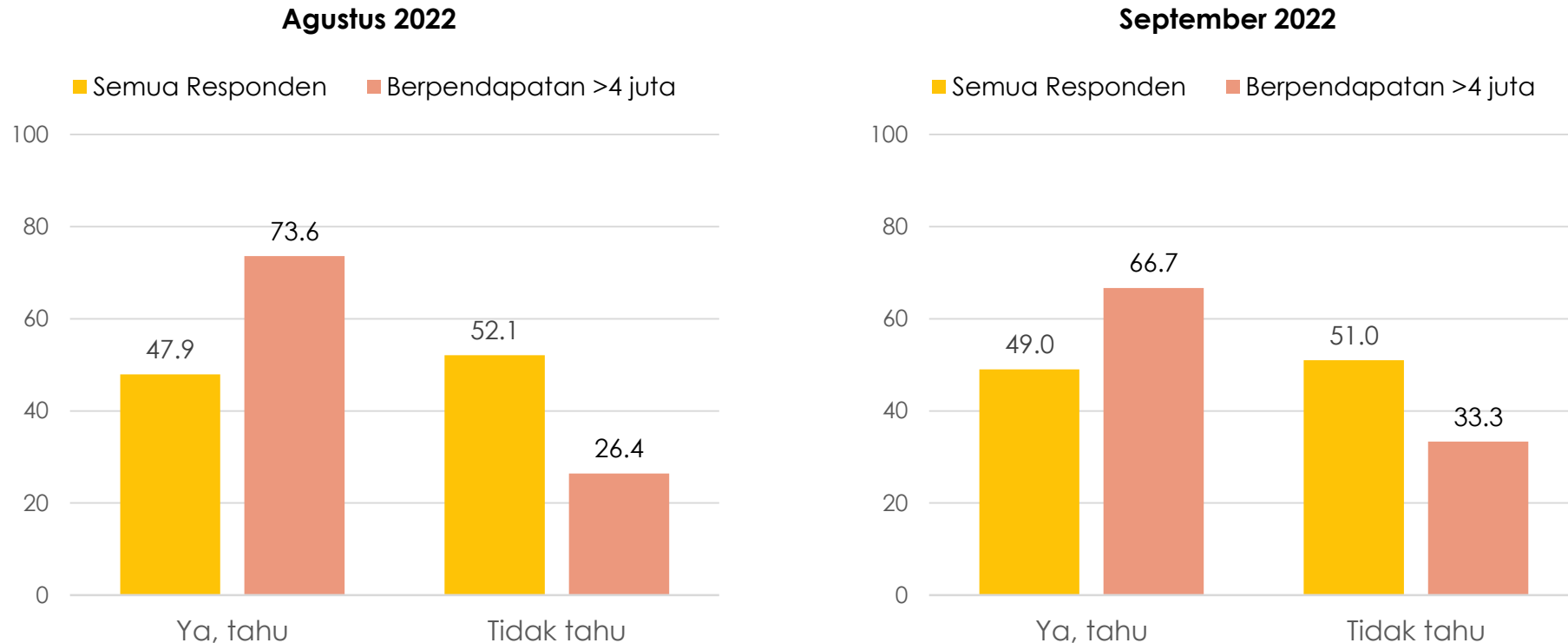
KEMUDAHAN MENUNAIKAN PAJAK (BASE: MEMILIKI NPWP)

Apakah Ibu/Bapak merasa mudah, cukup mudah, agak sulit atau sulit dalam menunaikan kewajiban perpajakan Ibu/Bapak sendiri?... (%)



ADANYA SANKSI JIKA TIDAK MEMBAYAR PAJAK

Apakah Ibu/Bapak mengetahui adanya sanksi yang dikenakan apabila Ibu/Bapak tidak menunaikan kewajiban perpajakan?... (%)



Sekitar 49% tahu adanya sanksi yang dikenakan apabila Ibu/Bapak tidak menunaikan kewajiban perpajakan.

KENDALA YANG DIALAMI

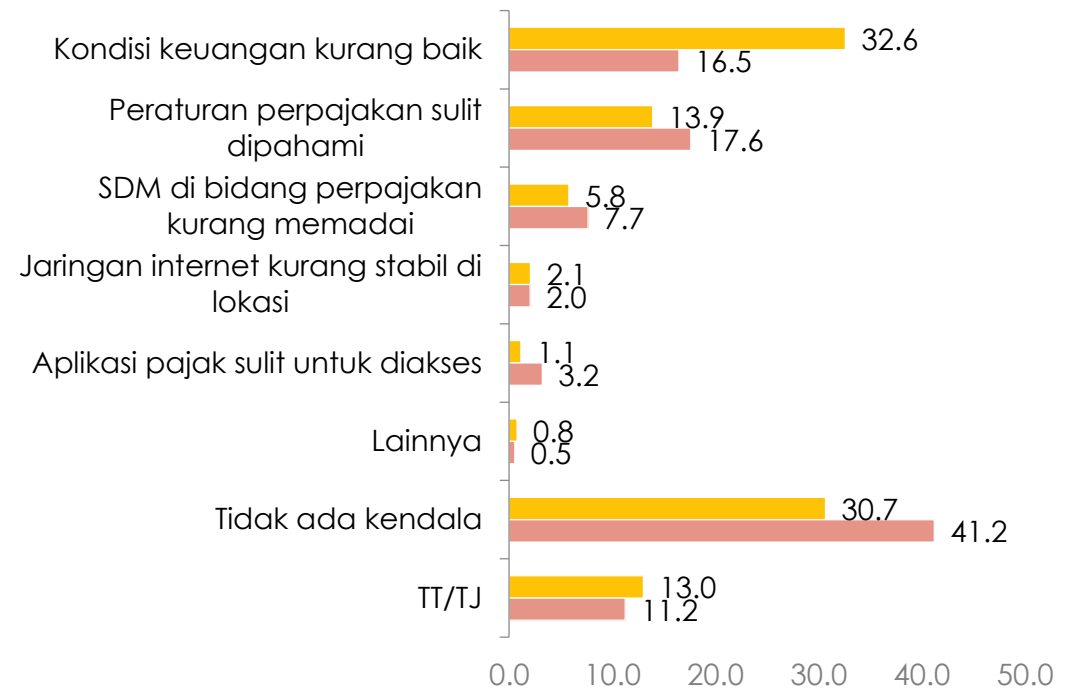
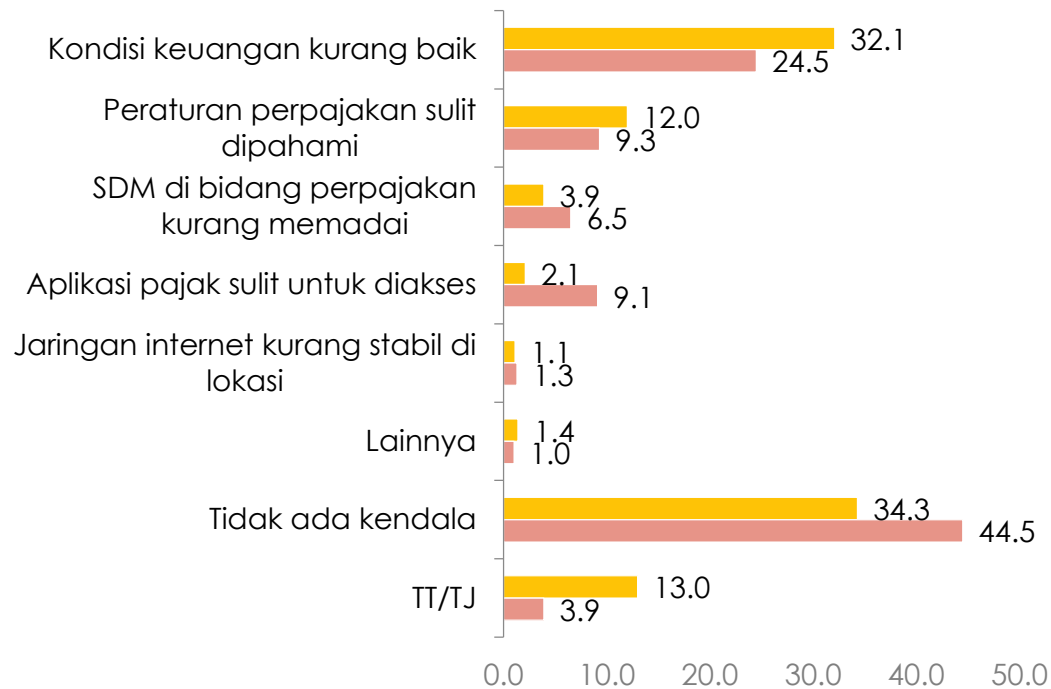
Apakah kendala utama Ibu/Bapak dalam menunaikan kewajiban perpajakan?... (%)

Agustus 2022

September 2022

■ Semua Responden ■ Berpendapatan >4 juta

■ Semua Responden ■ Berpendapatan >4 juta



Kendala utama dalam menunaikan kewajiban perpajakan adalah kondisi keuangan yang kurang baik.

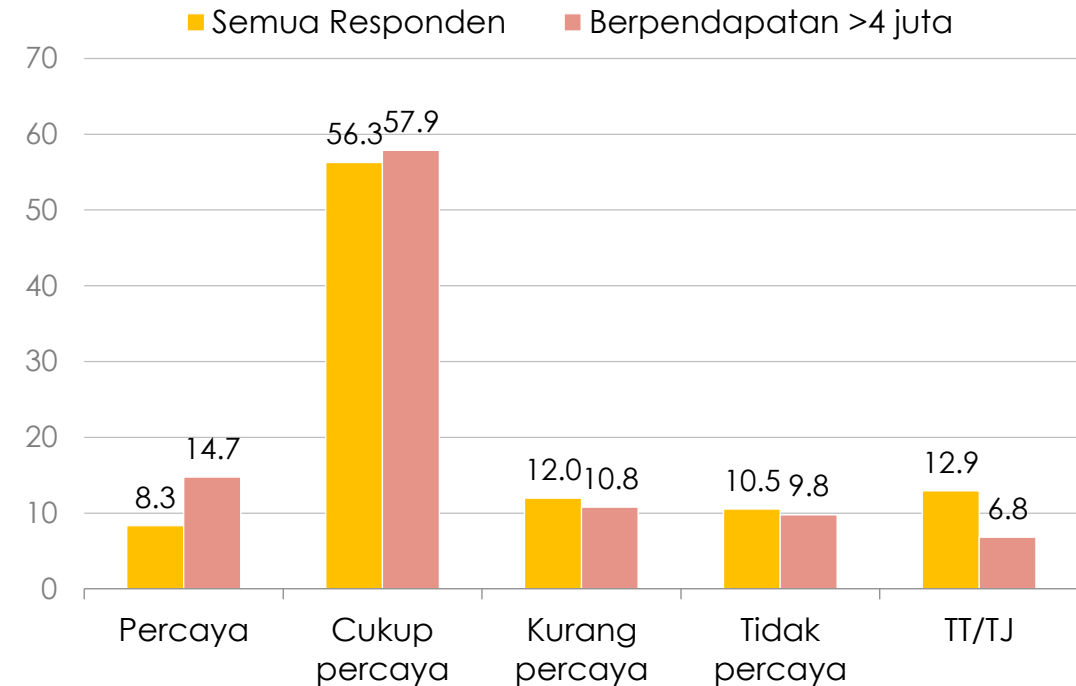
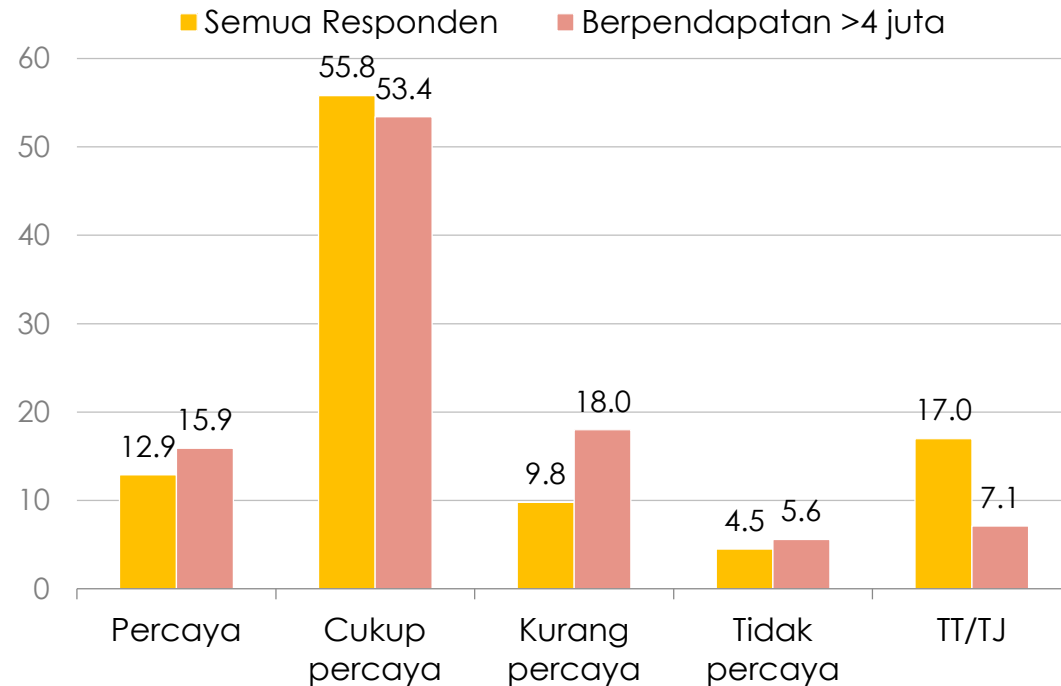


PAJAK MERUPAKAN BENTUK DARI PRINSIP GOTONG ROYONG

Apakah Ibu/Bapak percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya bahwa pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong?... (%)

Agustus 2022

September 2022

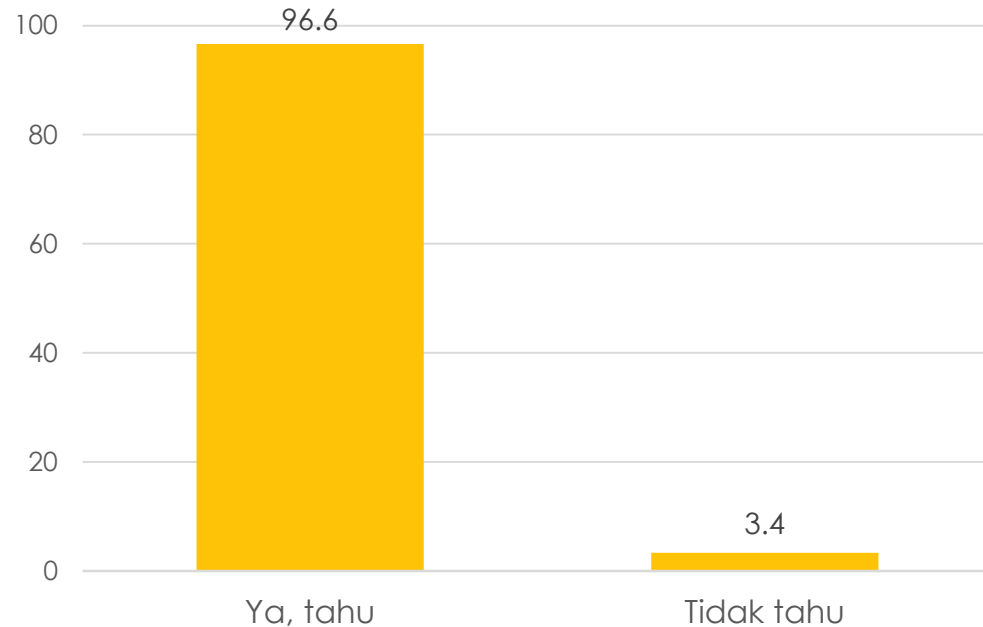


Mayoritas cukup percaya/percaya bahwa pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong.

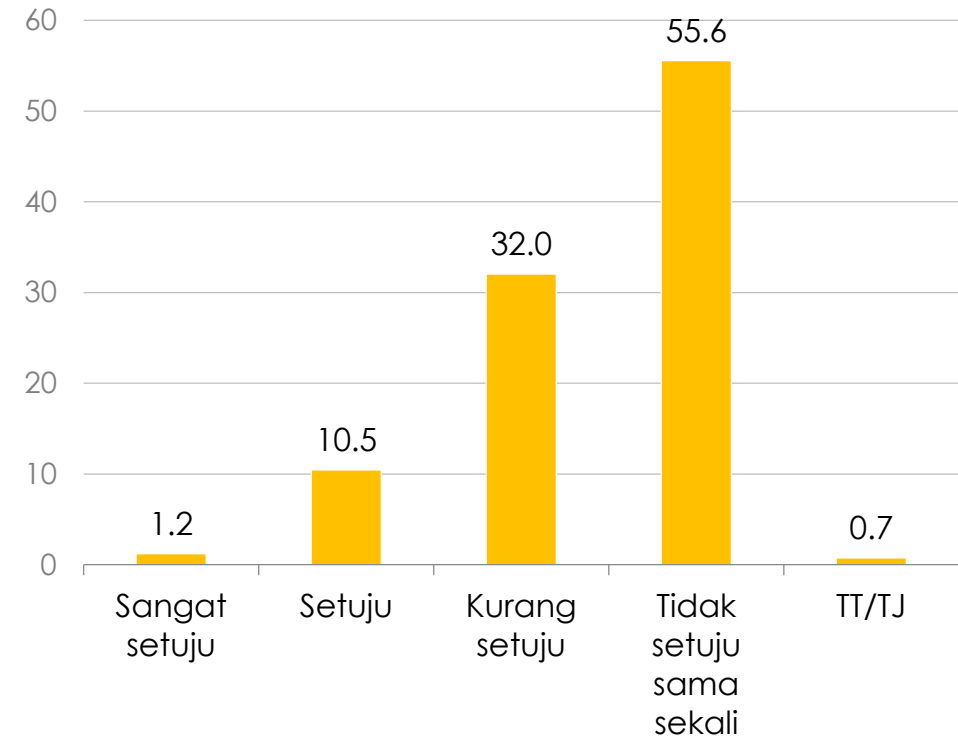
ISU KENAIKAN HARGA BBM MENURUT SEKTOR PERPAJAKAN

PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar berita bahwa pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022 lalu?... (%)



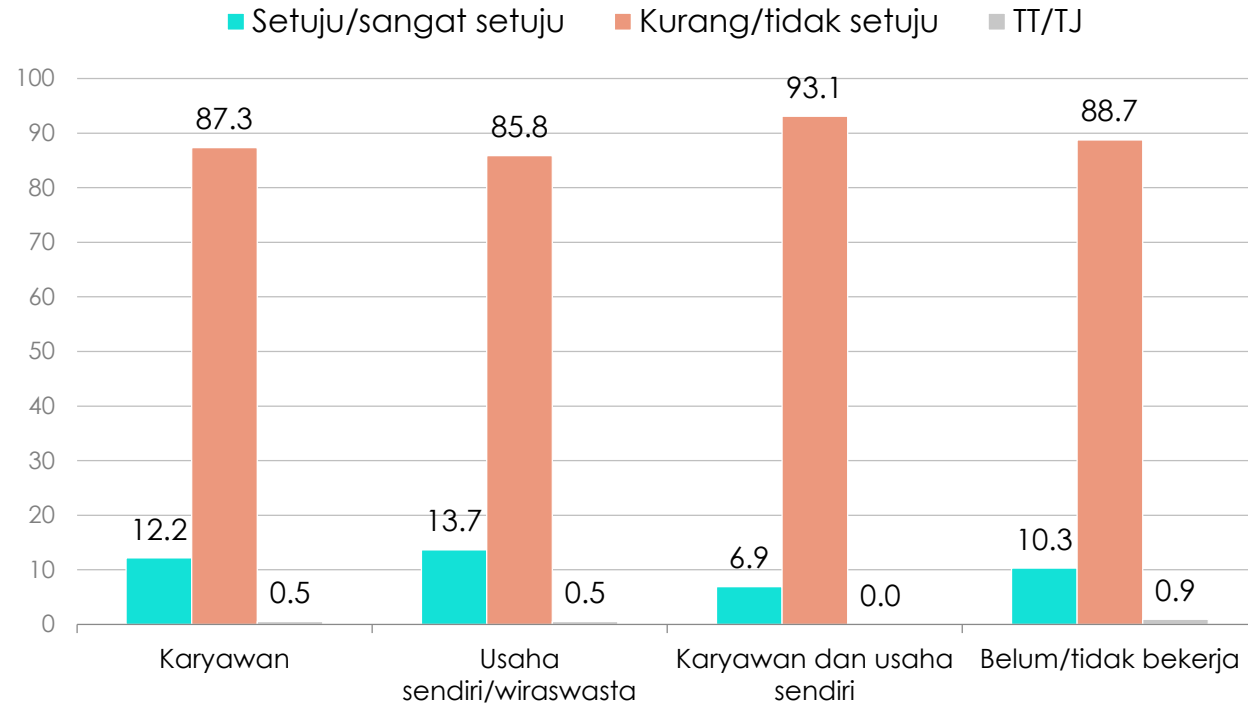
Seberapa setuju Ibu/Bapak dengan kebijakan pemerintah tersebut?... (%)



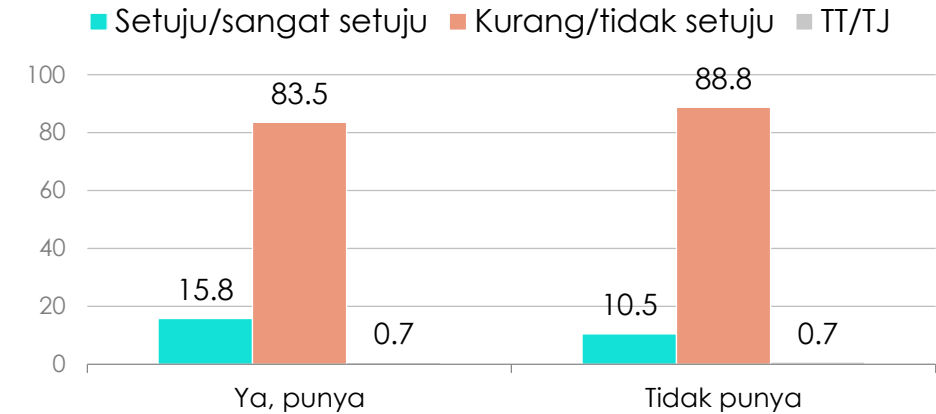
Mayoritas tahu bahwa pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022 lalu. Mayoritas kurang/tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut.

KENAIKAN HARGA BBM MENURUT STATUS PEKERJAAN, KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMBAYAR PAJAK

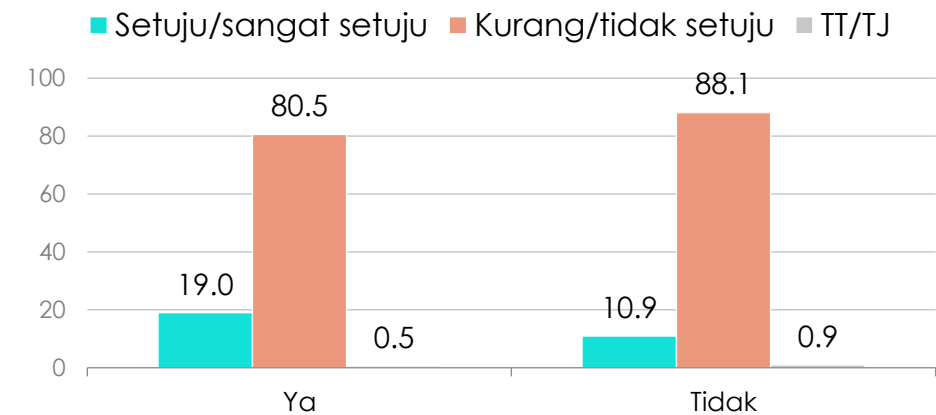
Status Pekerjaan



Kepemilikan NPWP



Membayar Pajak (Pemilik NPWP)

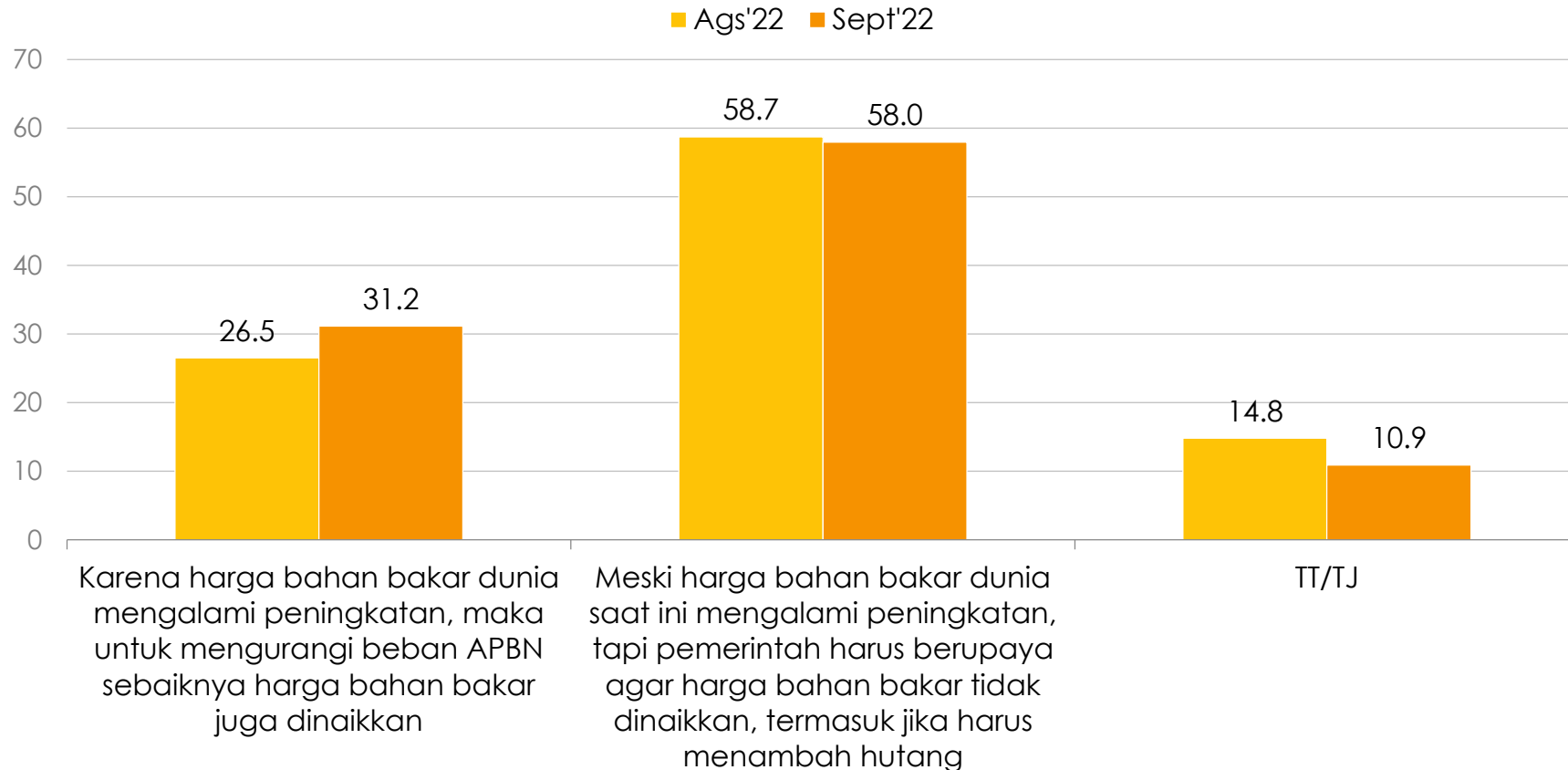


Mayoritas tidak setuju dengan kenaikan harga BBM di tiap status pekerjaan dan kepemilikan NPWP. Persetujuan lebih tinggi pada kelompok yang memiliki NPWP terutama yang membayar pajak.



HARGA BBM DINAIKKAN UNTUK MENGURANGI BEBAN APBN VS TIDAK DINAIKKAN MESKI HARUS MENAMBAH HUTANG

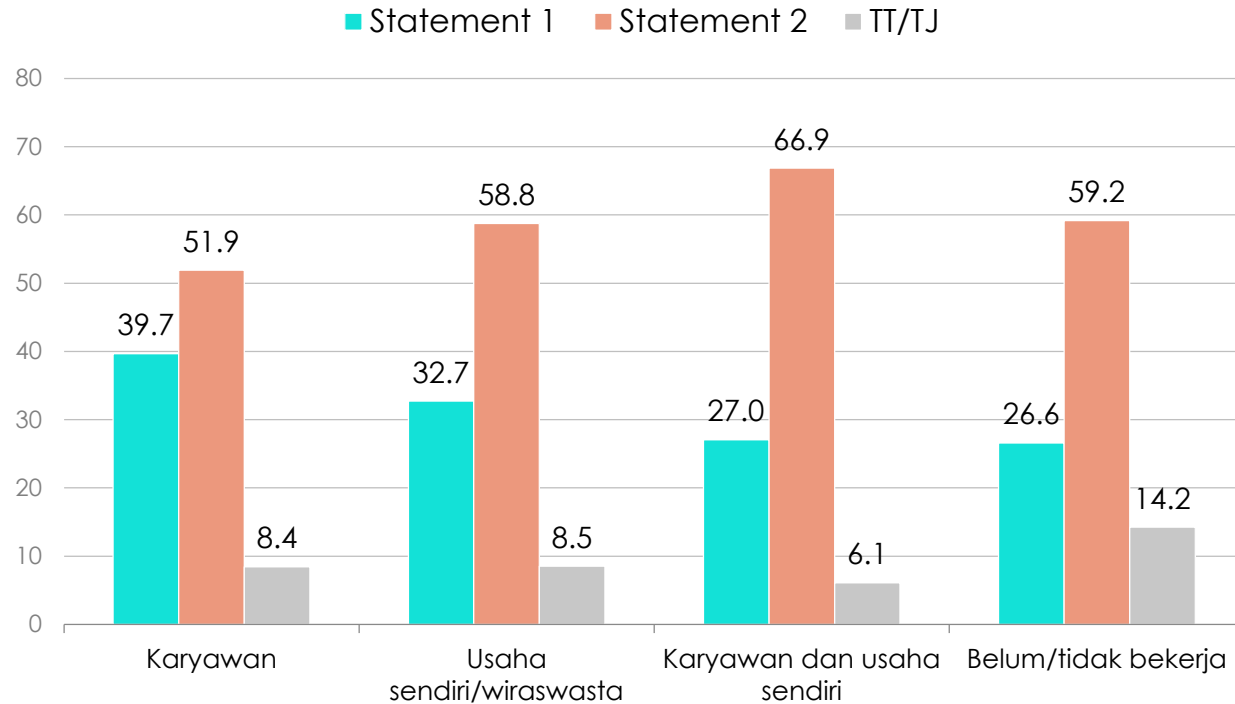
Di antara pendapat berikut mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Lebih banyak yang menginginkan harga bahan bakar tidak dinaikkan meski harus menambah hutang, 58%.

HARGA BAHAN BAKAR DUNIA MENINGKAT MENURUT STATUS PEKERJAAN, KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMBAYAR PAJAK

Status Pekerjaan

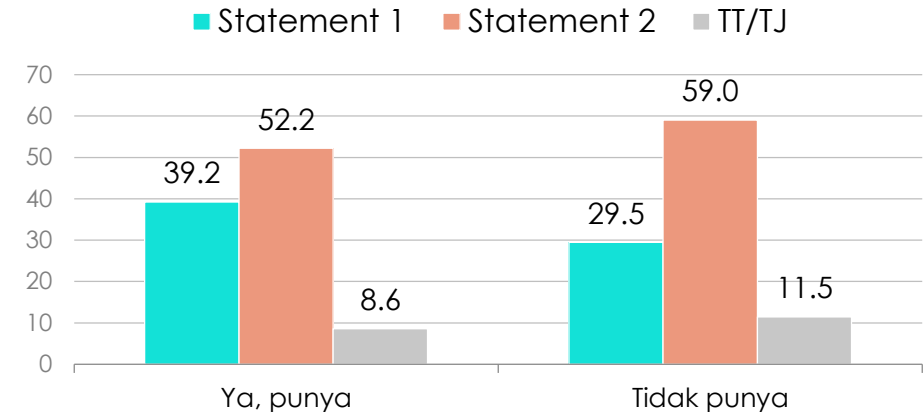


Statement 1: Karena harga bahan bakar dunia mengalami peningkatan, maka untuk mengurangi beban APBN sebaiknya harga bahan bakar juga dinaikkan

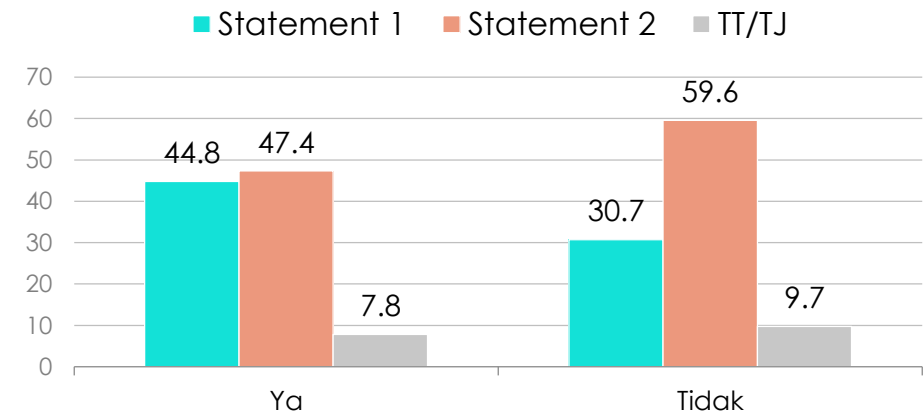
Statement 2: Meski harga bahan bakar dunia saat ini mengalami peningkatan, tapi pemerintah harus berupaya agar harga bahan bakar tidak dinaikkan, termasuk jika harus menambah hutang

Argumen kenaikan harga bahan bakar dunia lebih dapat diterima di kalangan karyawan, pemilik NPWP dan terutama yang membayar pajak.

Kepemilikan NPWP

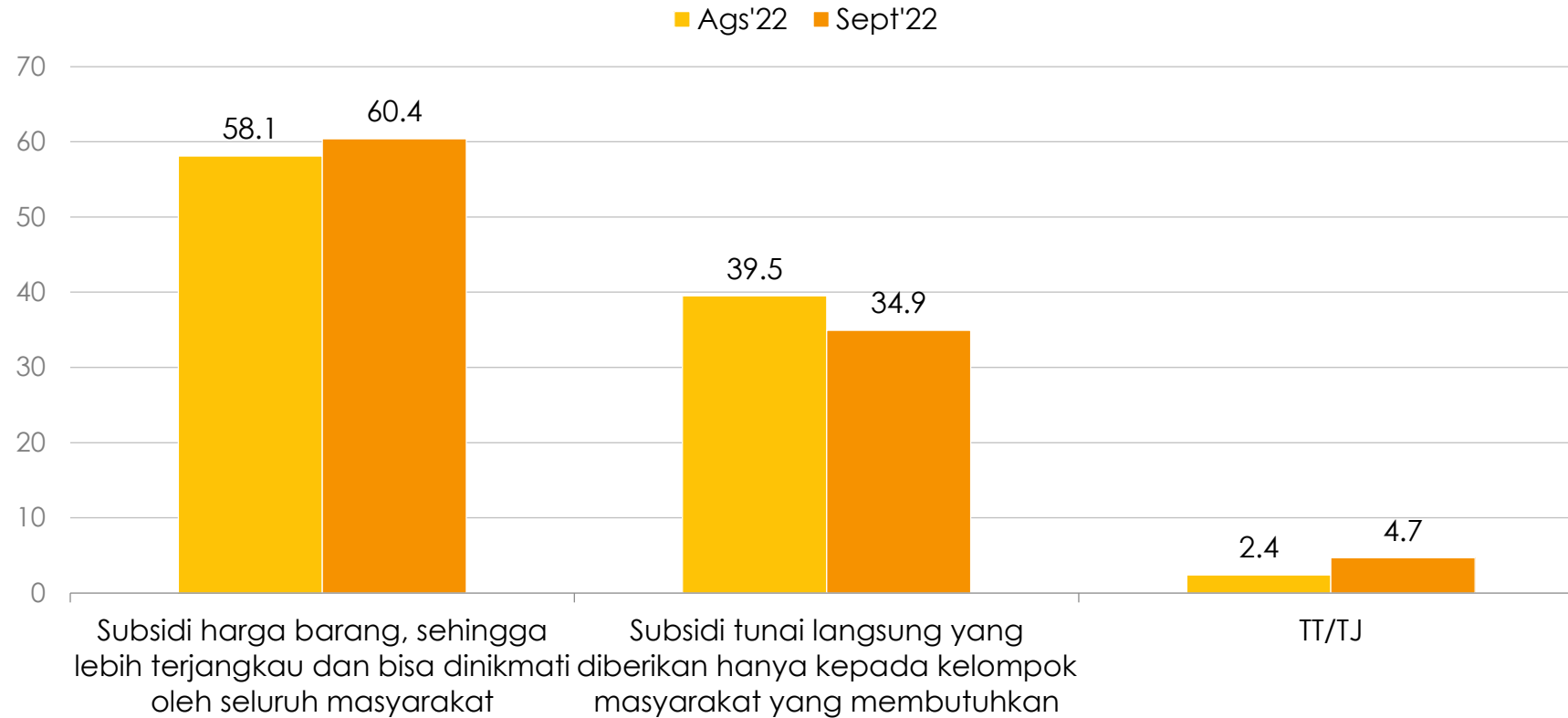


Membayar Pajak (Pemilik NPWP)



SUBSIDI HARGA BARANG VS SUBSIDI TUNAI

Di antara dua cara pemberian subsidi kepada masyarakat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)

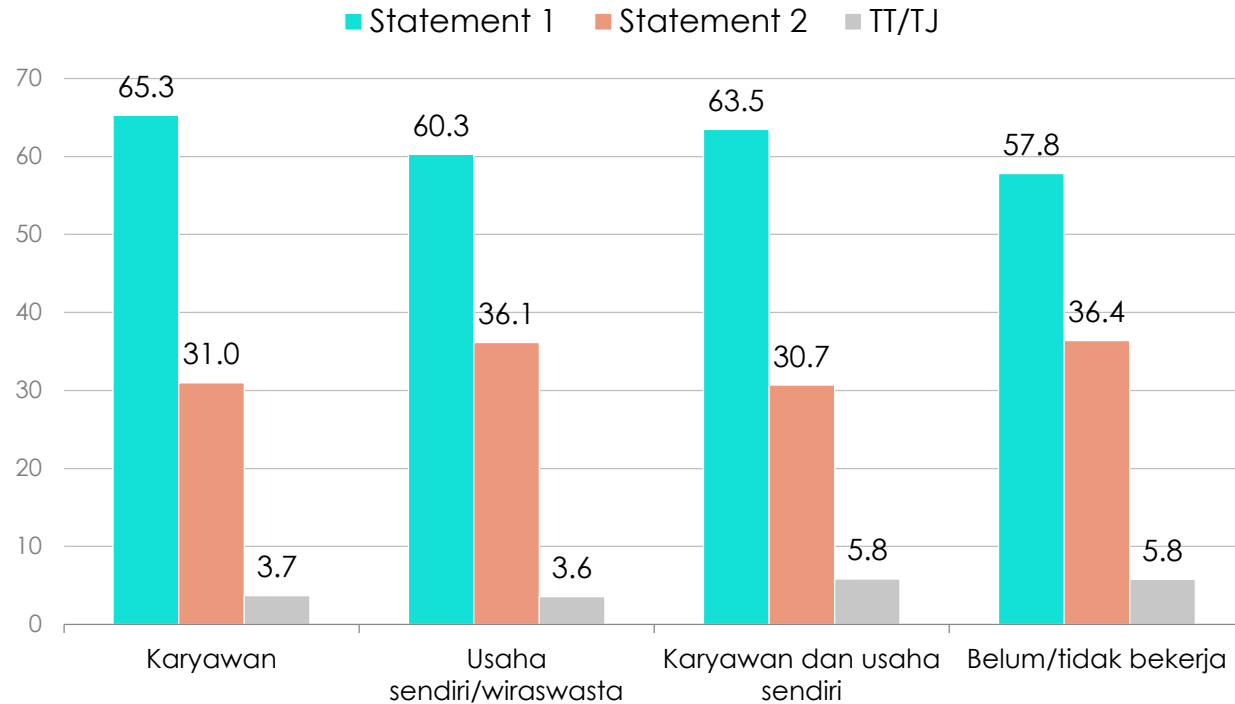


Mayoritas lebih sesuai jika subsidi harga barang, sehingga lebih terjangkau dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

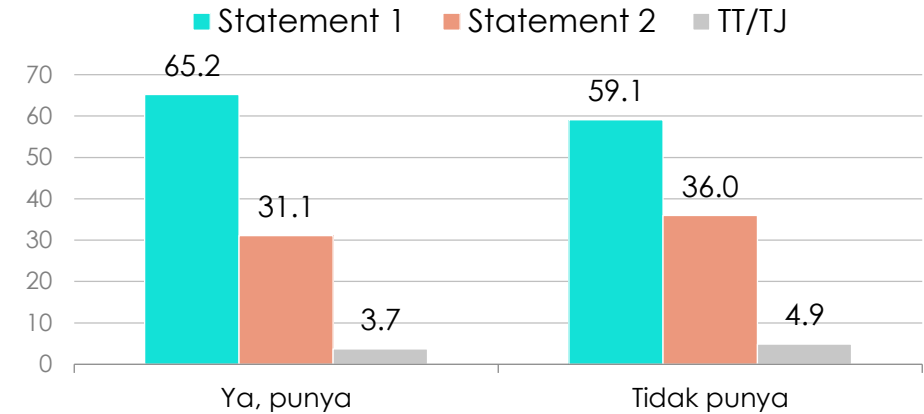


BENTUK SUBSIDI MENURUT STATUS PEKERJAAN, KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMBAYAR PAJAK

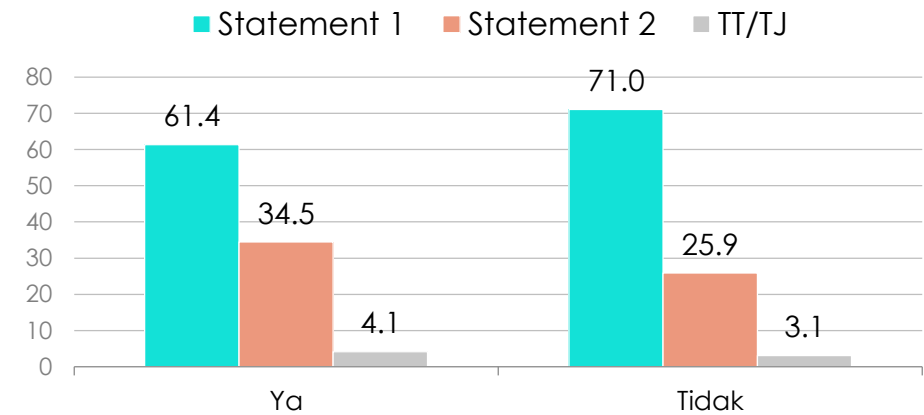
Status Pekerjaan



Kepemilikan NPWP



Membayar Pajak (Pemilik NPWP)



Statemet 1: Subsidi harga barang, sehingga lebih terjangkau dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat

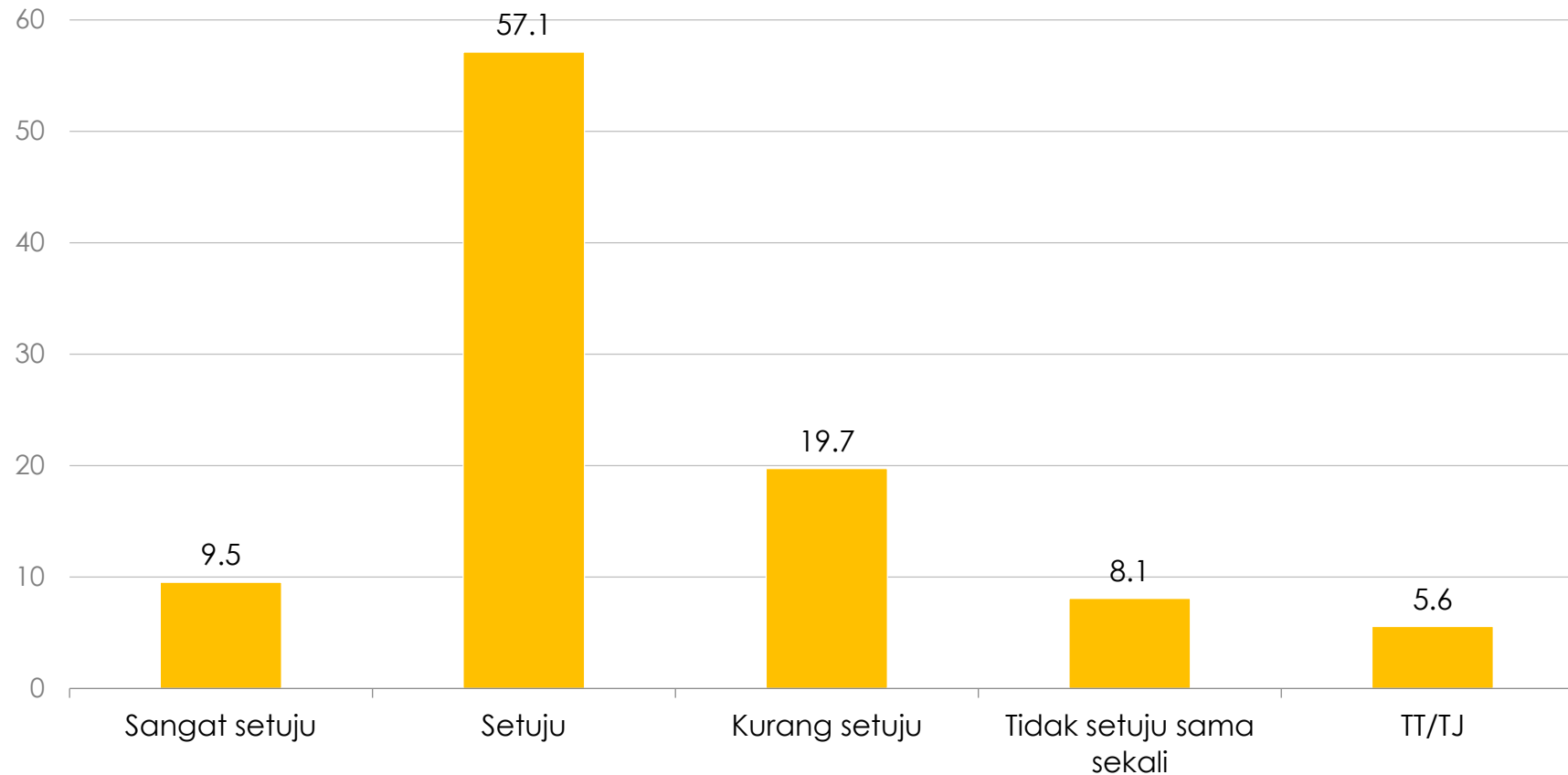
Statemet 2: Subsidi tunai langsung yang diberikan hanya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan

Mayoritas lebih menginginkan subsidi dalam bentuk harga barang agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.



SUBSIDI BBM TIDAK TEPAT SASARAN

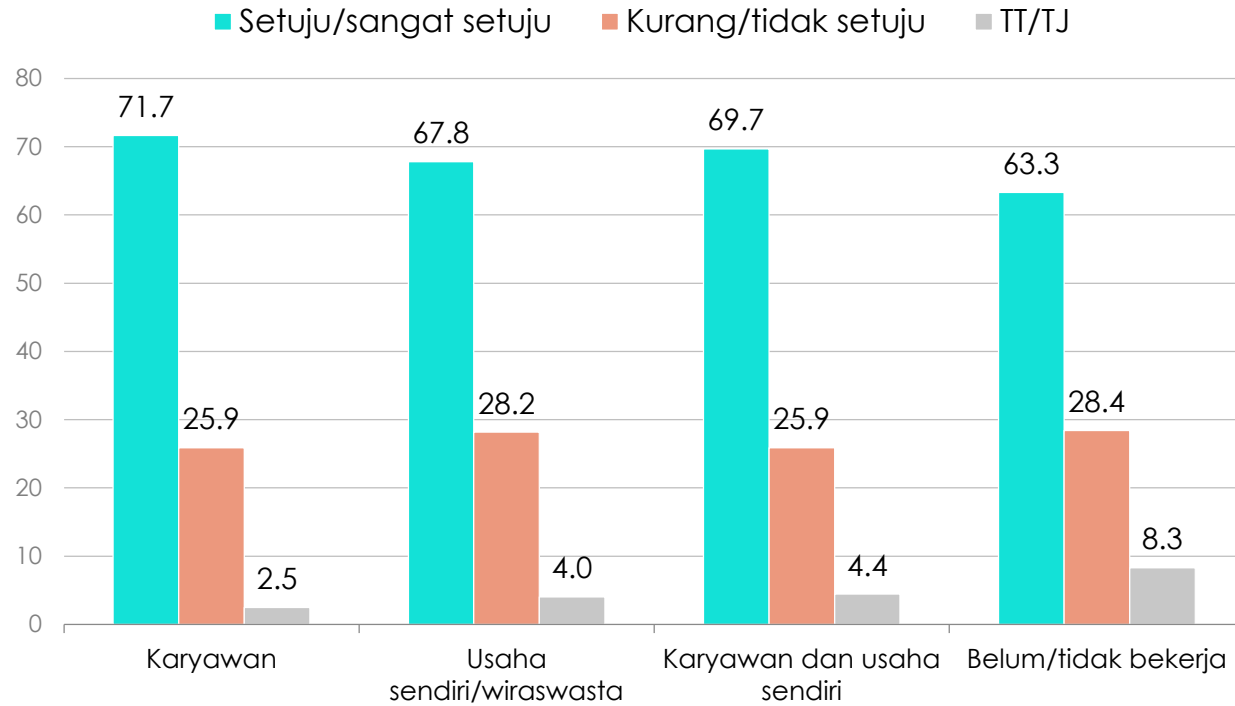
Ada yang berpendapat bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh orang mampu, yang mampu membeli kendaraan bermotor. Seberapa setuju Ibu/Bapak dengan pendapat tersebut?... (%)



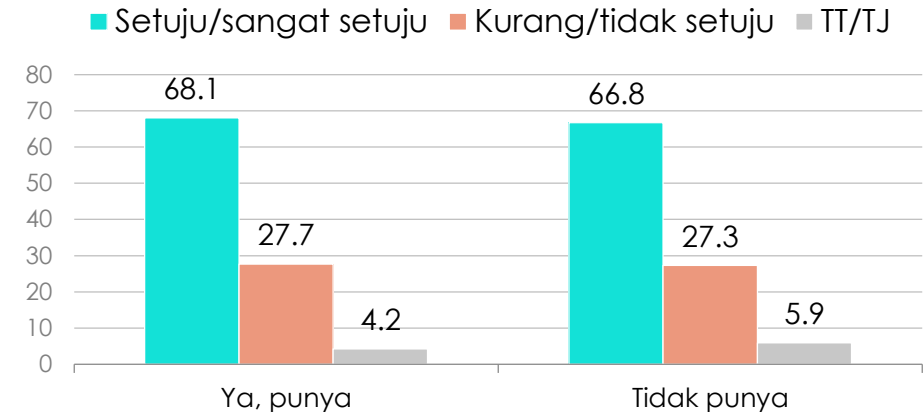
Mayoritas setuju/sangat setuju bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh orang mampu.

SUBSIDI TIDAK TEPAT SASARAN MENURUT STATUS PEKERJAAN, KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMBAYAR PAJAK

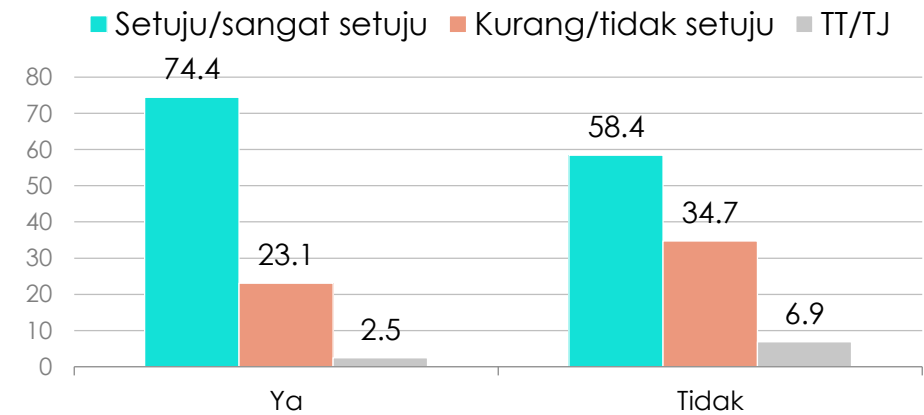
Status Pekerjaan



Kepemilikan NPWP



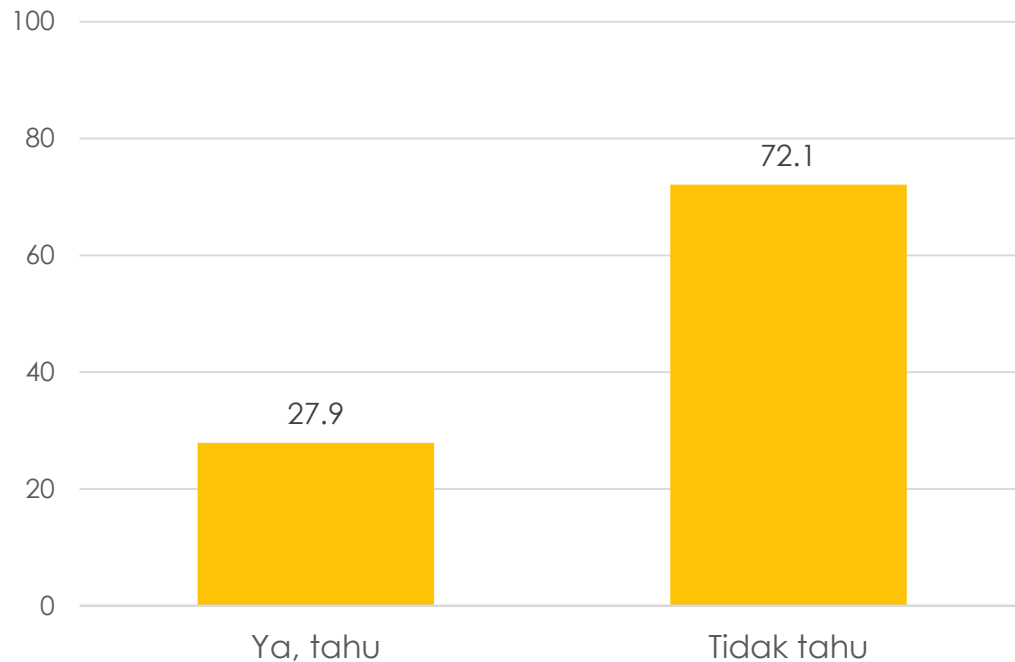
Membayar Pajak (Pemilik NPWP)



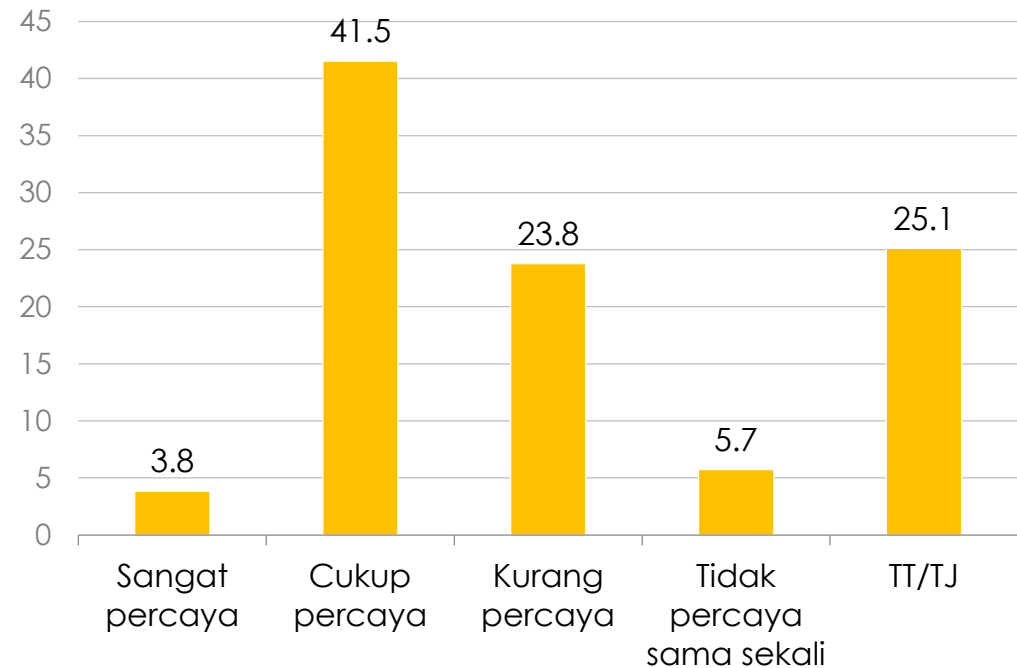
Mayoritas setuju subsidi tidak tepat sasaran di tiap status pekerjaan, kepemilikan NPWP. Persetujuan lebih tinggi di hampir setiap kelompok kecuali pemilik NPWP yang tidak membayar pajak.

APBN UNTUK SUBSIDI BBM TAHUN 2022 MEMBENGGKAK

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar berita bahwa anggaran negara (APBN) untuk subsidi BBM tahun 2022 ini membengkak hingga 502 triliun rupiah?... (%)



Seberapa percaya Ibu/Bapak dengan berita tersebut?... (%)

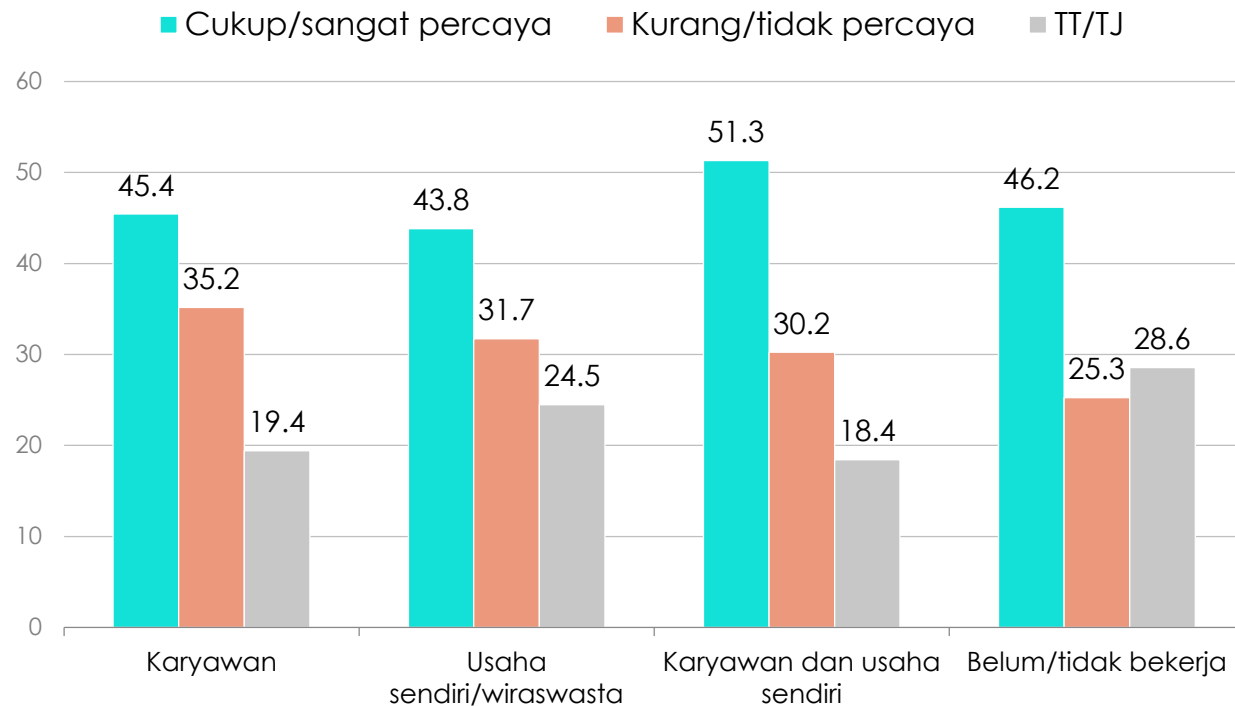


Sekitar 27.9% yang tahu bahwa anggaran negara (APBN) untuk subsidi BBM tahun 2022 ini membengkak hingga 502 triliun rupiah, dan lebih banyak warga yang percaya dengan berita tersebut.

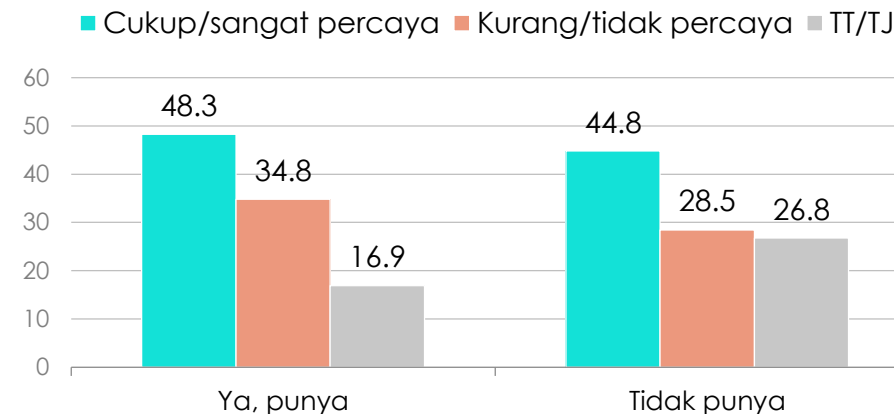


PERCAYA BEBAN APBN UNTUK SUBSIDI MEMBENGGKAK MENURUT STATUS PEKERJAAN, KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMBAYAR PAJAK

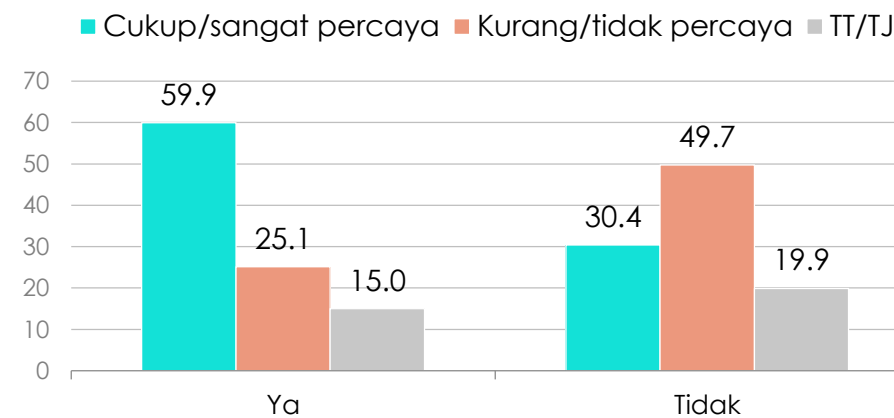
Status Pekerjaan



Kepemilikan NPWP



Membayar Pajak (Pemilik NPWP)



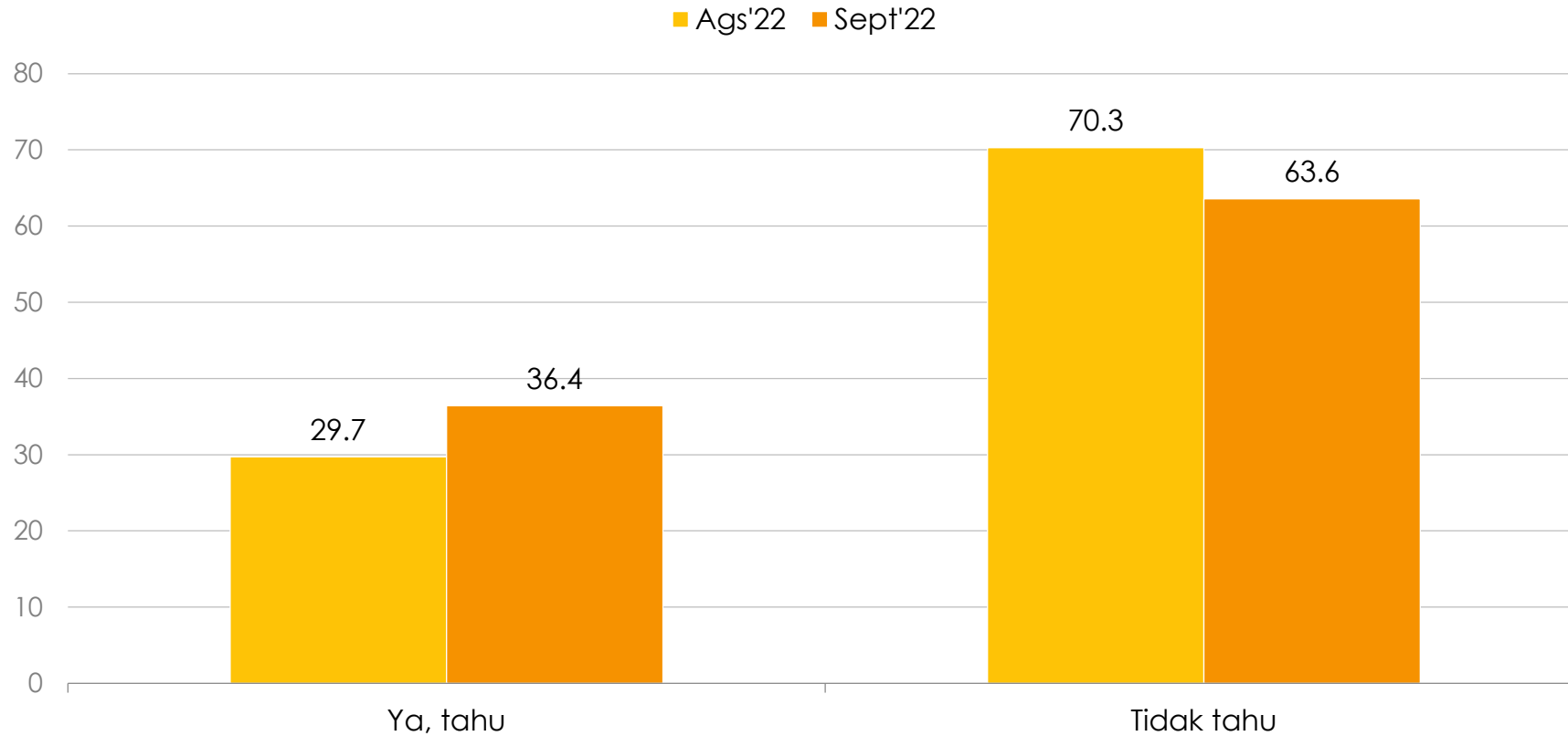
Kebanyakan percaya bahwa beban APBN untuk subsidi BBM membengkak hingga 502 T, terutama pemilik NPWP yang membayar pajak.



PERTANAHAN

AWARENESS TERHADAP PTSL

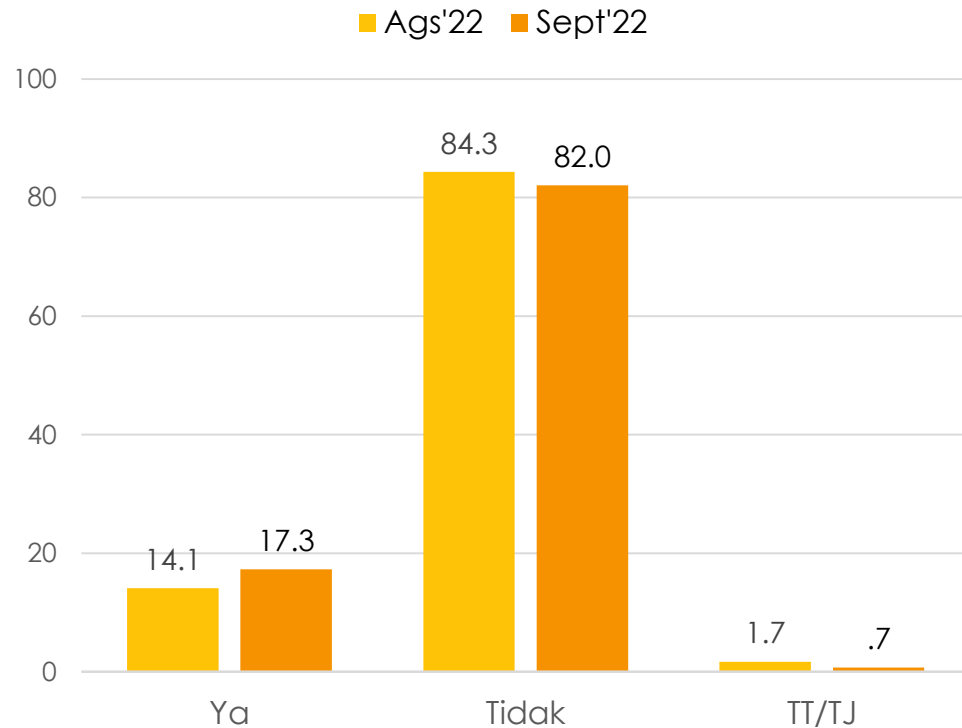
Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program sertifikat tanah untuk rakyat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?... (%)



Sekitar 36.4% pernah dengar program sertifikat tanah untuk rakyat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mengalami peningkatan cukup besar ketimbang sebulan lalu.

MEMBUAT SERTIFIKAT PROGRAM PTSL

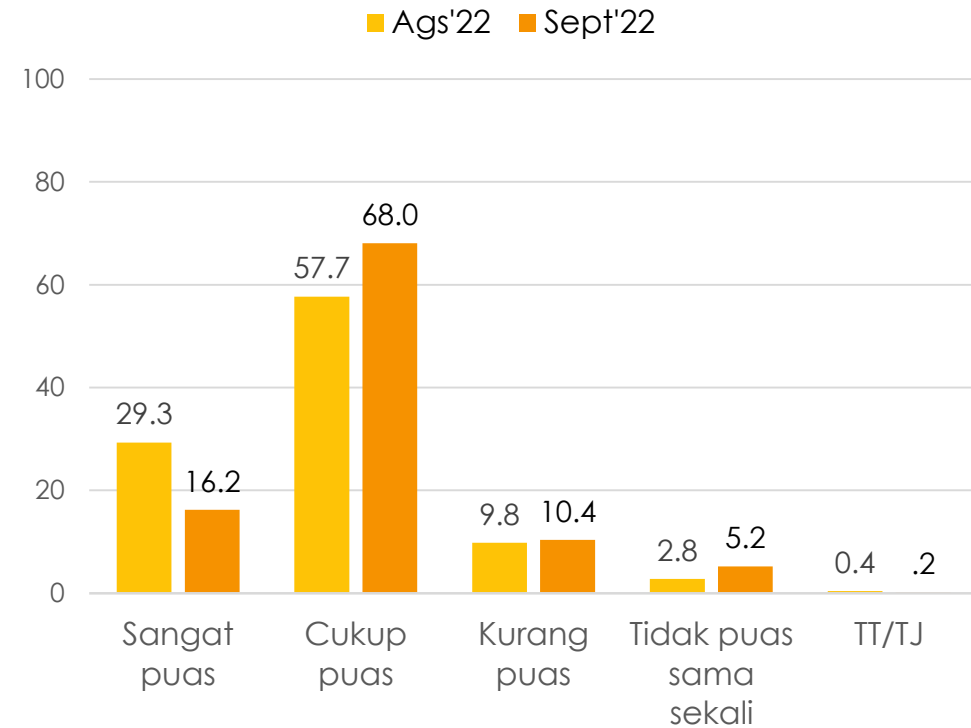
Apakah Ibu/Bapak mengajukan pembuatan sertifikat tanah atau menjadi peserta program PTSL tersebut?... (%)



Sekitar 17.3% mengajukan pembuatan sertifikat tanah atau menjadi peserta program PTSL tersebut, dari yang tahu mayoritas puas dengan program PTSL tersebut.

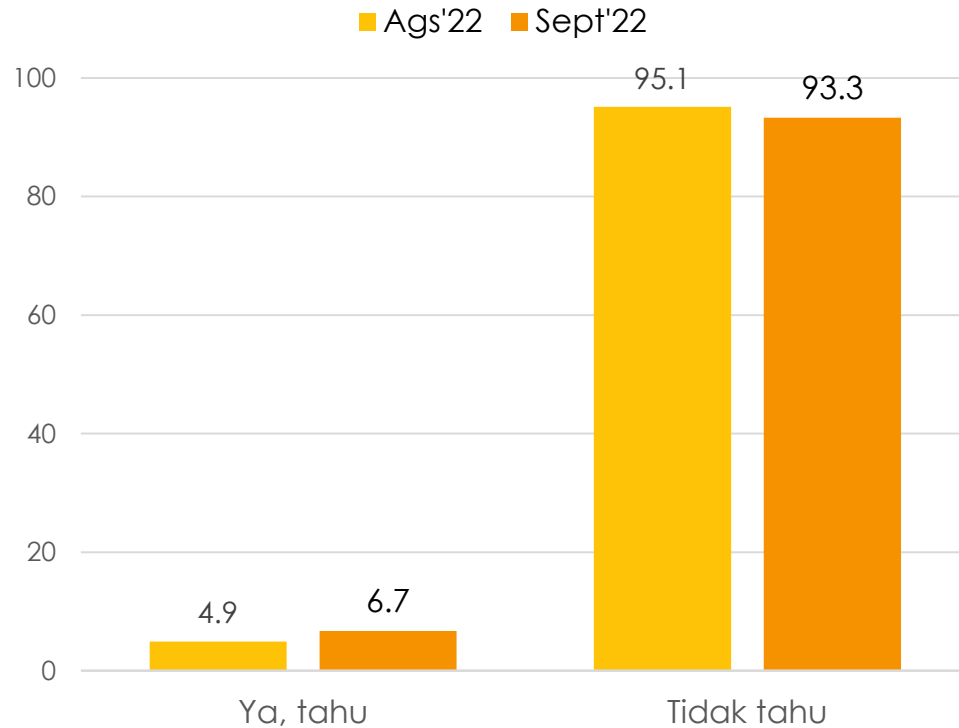
Jika ya, apakah Ibu/Bapak merasa sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan program PTSL tersebut?... (%)

(Base: Mengajukan program PTSL)

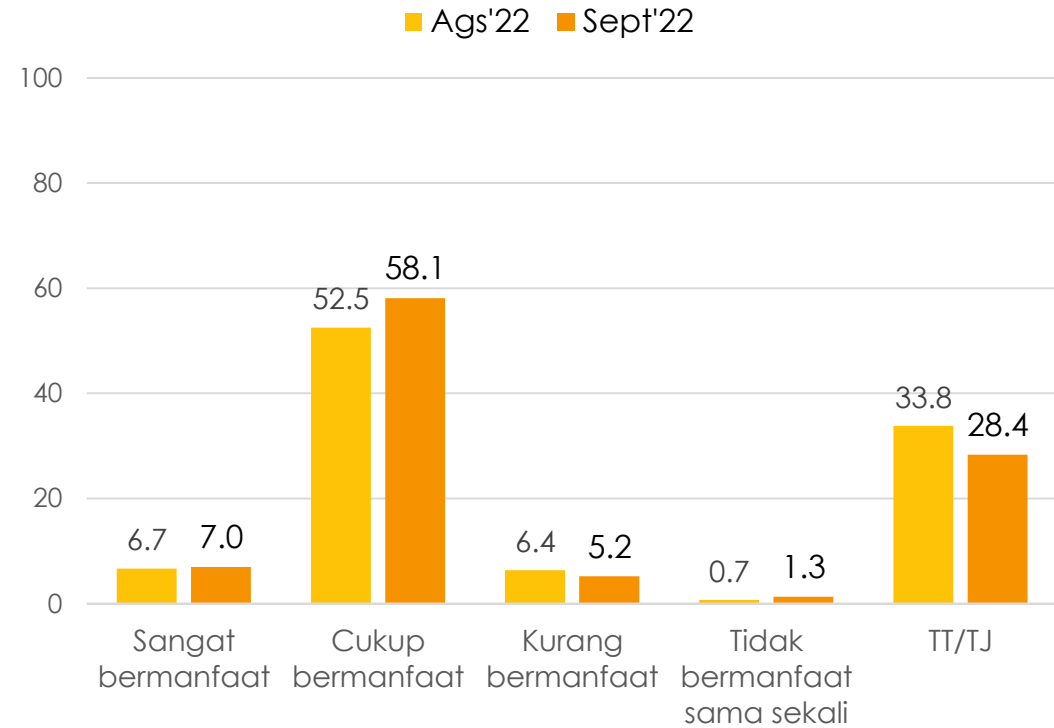


PROGRAM PELATARAN

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang baru diluncurkan oleh Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto belum lama ini? ... (%)



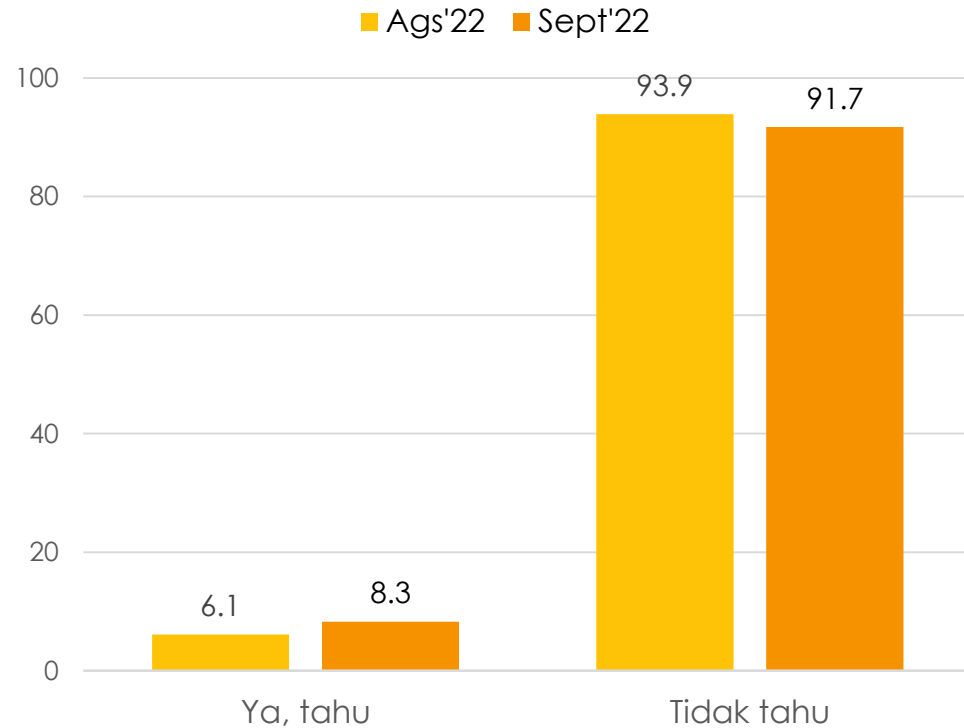
Menurut Ibu/Bapak seberapa bermanfaat program PELATARAN tersebut bagi masyarakat dalam urusan pertanahan?... (%)



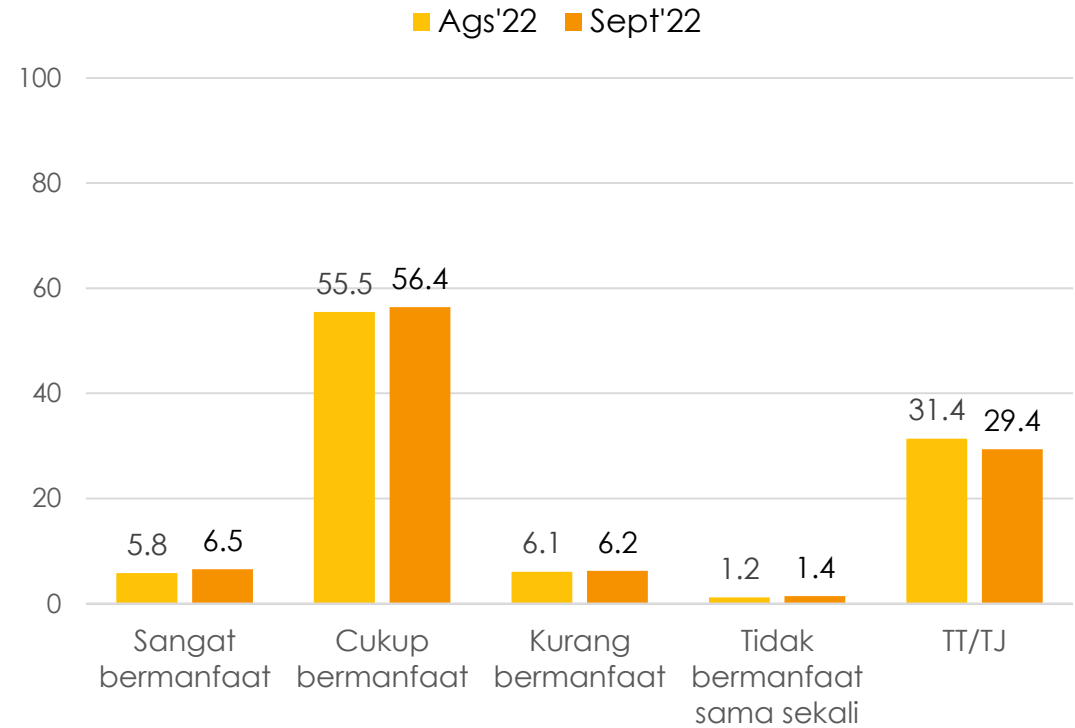
Baru sekitar 6.7% yang tahu, tapi mayoritas menilai program PELATARAN bermanfaat.

HOTLINE PENGADUAN

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Hotline Pengaduan yang juga baru diluncurkan oleh Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto belum lama ini?... (%)



Menurut Ibu/Bapak seberapa bermanfaat program Hotline Pengaduan tersebut bagi masyarakat dalam urusan pertanahan dan tata ruang?... (%)



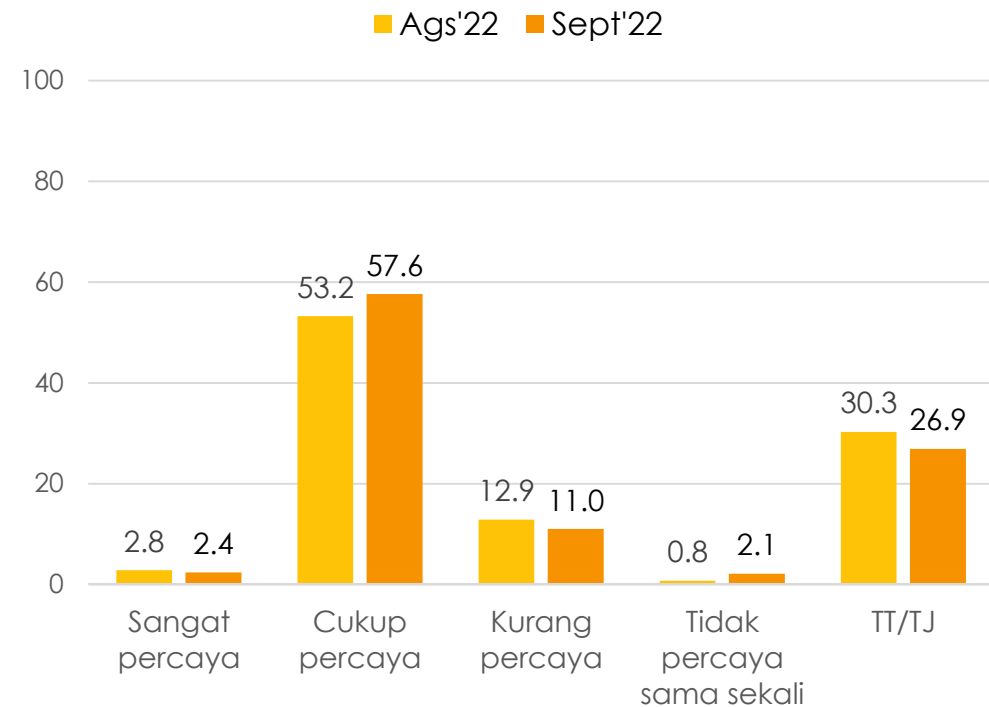
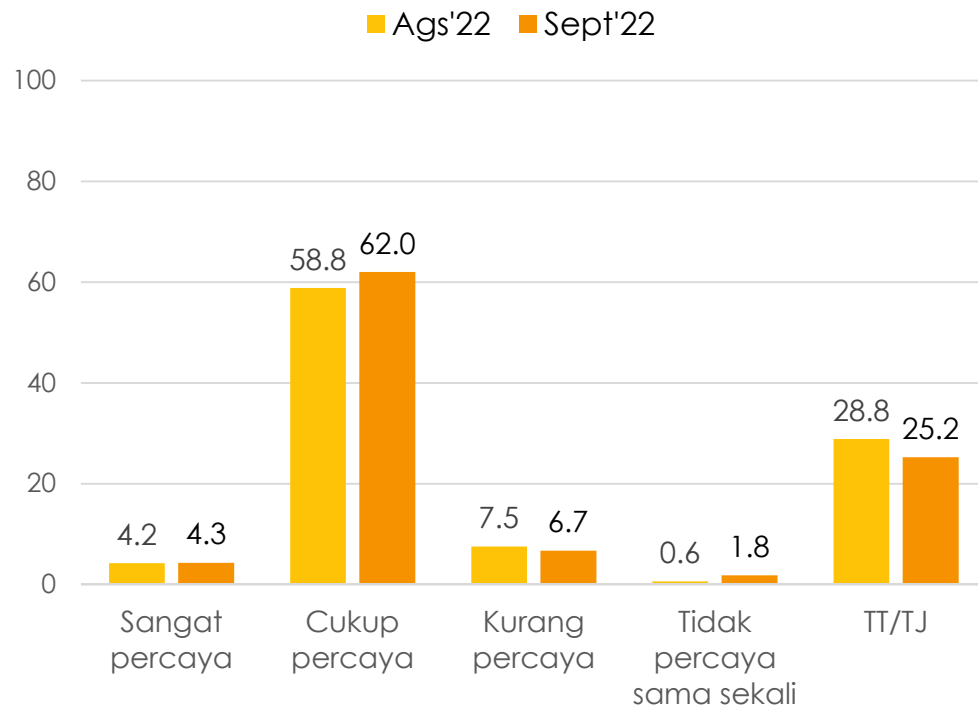
Baru sekitar 8.3% tahu program Hotline Pengaduan, tapi mayoritas menilai bermanfaat.

SEBERAPA PERCAYA BAHWA ...

Seberapa percaya Ibu/Bapak :... (%)

Di bawah Menteri ATR/BPN yang baru, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, program sertifikat tanah untuk rakyat akan semakin luas manfaatnya bagi masyarakat

Di bawah Menteri ATR/BPN yang baru, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, konflik agraria/sengketa pertanahan antar masyarakat semakin berkurang



Mayoritas cukup percaya.

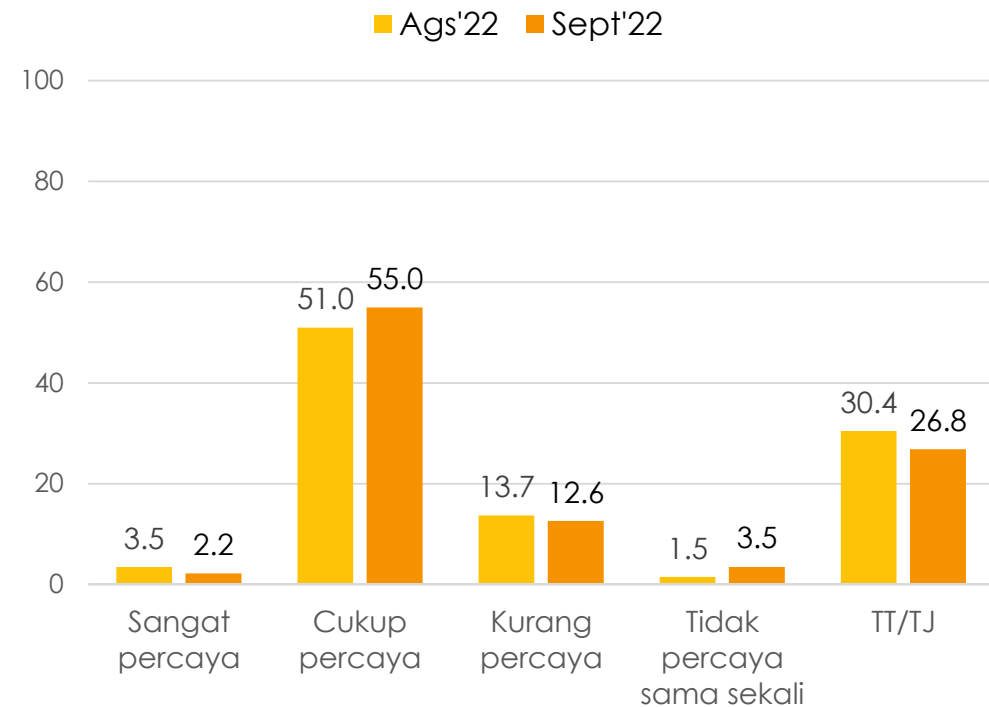
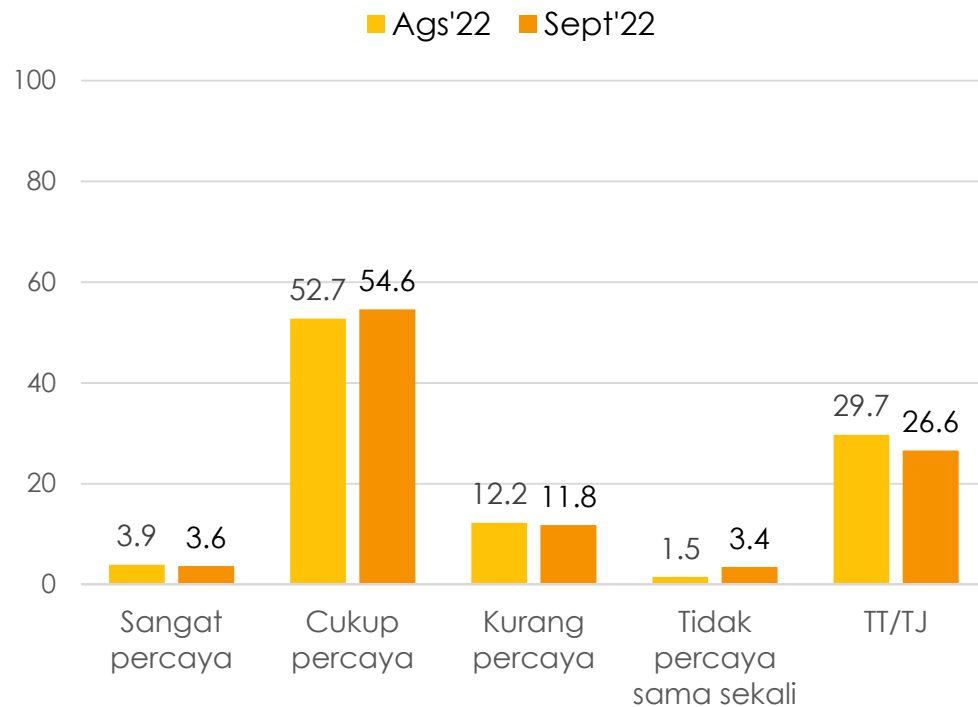
INDIKATOR

SEBERAPA PERCAYA BAHWA ...

Seberapa percaya Ibu/Bapak :... (%)

Di bawah Menteri ATR/BPN yang baru, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, akan mampu melawan praktik mafia tanah

Di bawah Menteri ATR/BPN yang baru, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, aksi penyerobotan tanah warga oleh pengusaha semakin berkurang



Mayoritas cukup percaya.



KESIMPULAN

KESIMPULAN

- Sekitar 18-19% warga memiliki NPWP, terutama kelompok warga dengan tingkat pendapatan kotor rumah tangga 4 juta atau lebih, 45-46%.
- Mayoritas pemilik NPWP menunaikan kewajibannya membayar pajak. Namun demikian, tampak masih sangat besar yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak, sekitar 39-40%.
- Kelompok karyawan paling besar tingkat kepemilikan NPWP dan kepatuhan membayar pajak. Sekitar 36.7% kelompok karyawan memiliki NPWP, di antara yang memiliki NPWP sekitar 73% membayar pajak. Sementara kelompok wirausaha yang merupakan kelompok terbesar pada segmen produktif, tingkat kepemilikan NPWP di sekitar rata-rata secara umum (18.7%), dengan tingkat kepatuhan membayar pajak paling rendah, sekitar 57%.
- Sekitar 74-75% pemilik NPWP merasa mudah dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak. Secara umum tampak tidak banyak perubahan terkait faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menunaikan kewajiban pajak, tapi pada kelompok yang lebih potensial membayar pajak, peraturan perpajakan yang sulit dipahami tampak mengalami peningkatan paling besar.

KESIMPULAN

- Ini kemungkinan terutama karena sosialisasi dari petugas pajak yang jarang diterima publik.
- Mayoritas cukup atau sangat percaya bahwa pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong, tapi sangat banyak publik yang kurang atau bahkan tidak paham dengan pajak dan manfaat uang pajak. Sekali lagi, ini kemungkinan besar terkait dengan minimnya persoalan perpajakan disosialisasikan kepada warga.
- Dan bukan hanya persoalan sosialisasi tetapi juga persuasi publik tentang perpajakan. Segmen pajak tampak sangat sempit, oleh karena itu perlu ada reformasi sektor perpajakan jika ingin meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
- Tapi hal ini sangat sensitif, perlu sangat hati-hati, terlebih di tengah situasi yang sulit sekarang karena efek kenaikan harga BBM. Warga secara umum, termasuk pembayar pajak (memiliki NPWP), mayoritas menolak kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar yang berakibat naiknya harga BBM.
- Argumen bahwa harga minyak dunia mengalami peningkatan sehingga beban APBN semakin membengkak lebih dapat diterima oleh kalangan pembayar pajak, namun bentuk subsidi ideal bagi mayoritas warga adalah harga barang yang murah sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat, termasuk menurut pembayar pajak.

KESIMPULAN

- Sementara sektor pertanahan secara umum tampak terindikasi peningkatan persepsi positif di kalangan warga.
- Awareness dan kepesertaan warga dalam proram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tampak mengalami peningkatan, dengan tingkat kepuasan terhadap program konsisten mayoritas, lebih dari 80% di antara warga yang mengikuti program.
- Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan Hotline Pengaduan, awareness dan evaluasinya relatif stabil dengan kecenderungan semakin positif.
- Ini mendorong kepada tingkat optimisme warga di bawah kepemimpinan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN yang baru sejumlah persoalan pertanahan akan semakin baik, yaitu program sertifikat tanah akan semakin luas manfaatnya bagi warga, konflik pertanahan antar masyarakat semakin berkurang, melawan praktik mafia tanah, dan aksi penyerobotan tanah warga oleh pengusaha semakin berkurang.

TERIMA KASIH



Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Jakarta Pusat

Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867

Website: www.indikator.co.id